



Katalog/Catalog:  
5102003

**Jilid - 1**  
**Volume - 1**

# Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020

di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur,  
dan Nusa Tenggara Barat

(Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)



**Agricultural SDGs Indicator 2020**  
**in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara**  
(the Integrated Agricultural Survey Results)



BADAN PUSAT STATISTIK



**Jilid - 1**  
Volume - 1

# Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020

di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur,  
dan Nusa Tenggara Barat

(Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)

**Agricultural SDGs Indicator 2020**  
**in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara**  
(the Integrated Agricultural Survey Results)



**Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020  
di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat**  
(Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)

*Agricultural SDGs Indicator 2020 in West Java, East Java and West Nusa Tenggara  
(the Integrated Agricultural Survey Results)*

**ISBN:** 978-602-438-406-7

**No. Publikasi/Publication Number:** 05210.2101

**No. Katalog/BPS Catalogue:** 5102003

**Ukuran Buku/Book Size:** 18,2 cm x 25,7 cm

**Jumlah Halaman/Number of Pages:** vi + 48 halaman/ pages

**Pengarah/Director:**

M. Habibullah

**Penanggung Jawab/Person in Charge:**

Kadarmanto

Simon Sapary

**Penyunting/Editor:**

Rustum

Muhammad Adnan

**Naskah/Manuscript:**

Eunike Widya Parameswari

Aulia Dini Rafsanjani, Eta Dian Ayu A.Sita

Eka Rudiana, Aniisa Rizqi

**Pengolahan Data/Data Processing:**

Aulia Dini Rafsanjani, Fitria Hasanah, Wartiningsih, Achmad Dahlia

Miftahul Jannah, Herzainul Nur Hakim, Aniisa Rizqi, Zukha Latifah

Kadir, Octavia Rizki Prasetyo

**Desain Kover/Cover Design:**

Fitriana Nur Rachmah

**Tata Letak/Layout:**

Fitriana Nur Rachmah

**Penerbit/Published by:** ©BPS RI/BPS - Statistics Indonesia

**Pencetak/Printed by:** Badan Pusat Statistik

**Sumber Ilustrasi /Graphics by:** freepik.com, flaticon.com

**Sumber Foto /Photos by:** Humas BPS, unsplash.com

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/  
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all  
this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics  
Indonesia*

## Kata Pengantar

Pada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati seruan universal untuk mengambil tindakan dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Kesepakatan ini selanjutnya disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Untuk dapat mewujudkan TPB/SDGs, setiap negara memerlukan indikator yang dapat diandalkan untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kemajuan dan pencapaian secara nasional, regional dan global. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam menghasilkan indikator terkait TPB/SDGs, mulai dari kapasitas statistik dan sumber data yang terbatas serta kebutuhan untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga.

Menyadari urgensi untuk menghasilkan indikator yang handal dalam memenuhi TPB/SDGs, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI). SITASI pada tahun 2020 dilaksanakan dengan cakupan 3 Provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Melalui SITASI 2020 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menghasilkan 4 (empat) Indikator TPB/SDGs terkait Sektor pertanian, yakni Indikator 2.3.1; Indikator 2.3.2; Indikator 5.a.1; dan Indikator 2.4.1 yang dirangkum dalam *booklet* ini.

Besar harapan kami *booklet* ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi pengguna data tetapi juga untuk memberikan wawasan bagi penguatan kerja sama dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait. Hasil SITASI 2020 ini juga diharapkan akan bermanfaat bagi perencana, pembuat kebijakan, dan peneliti.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan *booklet* ini. Kami juga terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia



Suharyanto

## Foreward

---

In 2015, the United Nations agreed to a universal call to take action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. This agreement is hereinafter referred to as the Sustainable Development Goals (SDGs).

In order to realize SDGs, every country needs reliable indicators to support monitoring and evaluation of progress and achievements nationally, regionally and globally. However, there are a number of challenges in producing indicators related to SDGs, ranging from limited statistical capacity and data sources and the need to strengthen cooperation and coordination between Ministries / Agencies.

Recognizing the urgency to produce reliable indicators in meeting SDGs, BPS - Statistics Indonesia conducted an Integrated Agricultural Survey (SITASI). SITASI in 2020 was carried out with a coverage of 3 provinces, namely West Java, East Java, and West Nusa Tenggara.

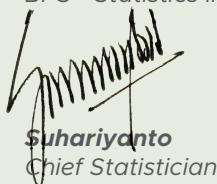
Through SITASI 2020, the Central Statistics Agency (BPS) can produce 4 (four) SDGs indicators related to the agricultural sector, namely indicator 2.3.1; indicator 2.3.2; indicator 5.a.1; and indicator 2.4.1 which is summarized in this booklet.

We really hope that this booklet can provide benefits for data users and provide insights for strengthening cooperation and coordination between related Ministries / Agencies. It is hoped that the results of SITASI 2020 will be of use to planners, policy makers and researchers.

Finally, we appreciate all those who have contributed to the completion of this booklet. We are also open to suggestions and criticism for improvements in the future.

Jakarta, December 2020

BPS - Statistics Indonesia



# Daftar Isi

*Contents*

**iii-iv**

**Kata Pengantar**  
*Forward*

**v**

**Daftar Isi**  
*Contents*

**1**

**Pendahuluan**  
*Preface*

**7**

**Perkembangan Terkini TPB Nasional**  
*Current Development of National SDGs*

**13**

**Indikator TPB Sektor Pertanian Terkini**  
*SDGs Indicator Agricultural Sector*

**19**

Indikator TPB 2.3.1  
*SDGs Indicator 2.3.1*

**20**

Indikator TPB 2.3.2  
*SDGs Indicator 2.3.2*

**21**

Indikator TPB 2.4.1  
*SDGs Indicator 2.4.1*

**38**

Indikator TPB 5.a.1  
*SDGs Indicator 5.a.1*

**45**

**Penutup**  
*Closing*

**48**

**Daftar Pustaka**  
*References*



<https://www.bps.go.id>

# 01

## Pendahuluan

*Preface*

<https://www.bps.go.id>



## Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. TPB atau SDGs yang kita kenal sekarang ini merupakan hasil karya kerja sama puluhan tahun negara-negara, PBB, pakar-pakar, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun kesepakatan dan tujuan bersama. TPB berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada TPB, khususnya pada sektor pertanian, antara lain Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan, yaitu "Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.") dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender, yaitu "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan").

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia.

*The Sustainable Development Goals (SDG) are a global action plan agreed upon by world leaders, including Indonesia, to end poverty, reduce inequality and protect the environment. The TPB or SDGs as we know them today are the result of decades of cooperation between countries, the United Nations, experts and other stakeholders to formulate agreements and common goals. The SDGs contain 17 Goals and 169 Targets that are expected to be achieved by 2030.*

*In line with this, the goals to be achieved in the SDGs, particularly in the agricultural sector, include Goal 2 (No Hunger, namely "Eliminating hunger, achieving good food and nutrition security, and promoting sustainable agriculture.") And Goal 5 (Gender Equality, namely "Achieving Gender Equality and Empowering Women").*

*Hunger is defined as a condition resulting from chronic lack of food consumption. In the long term, chronic hunger will adversely affect the health status of the people and cause high public expenditure on health. Not everyone has access to the food they need, and this leads to hunger and malnutrition on a large scale in the world.*



Sebagian penduduk dunia saat ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Jutaan anak-anak berusia di bawah lima tahun (balita) menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan dan kerusuhan sosial, angka ini terus meningkat.

Sektor pertanian dapat menyediakan pangan yang bergizi bagi semua orang dan menghasilkan pendapatan yang layak sehingga pada gilirannya dapat mengentaskan kemiskinan dan mengakhiri kelaparan. **Tujuan 2 dari TPB digunakan untuk melacak sejauh mana target ini tercapai.**

*Most of the world's population is currently chronically undernourished and unable to find enough food to meet their minimum needs. Millions of children under five years of age (toddlers) suffer from chronic or acute malnutrition during seasons of food shortages, famine seasons and social unrest, this figure continues to increase.*

*The agricultural sector can provide nutritious food for all people and generate a decent income which in turn can alleviate poverty and end hunger. **Goal 2 of the SDGs is used to track the extent to which this target has been achieved.***



Kesetaraan gender didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara. Kesetaraan gender bukan sekedar hak asasi manusia yang fundamental, namun juga landasan yang diperlukan untuk kehidupan dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Mengatasi ketidaksetaraan gender sangat penting dalam meraih keberlanjutan pada sektor pertanian. Tingkat ketimpangan yang masih tinggi dapat mempersulit peningkatan produktivitas serta pengurangan kemiskinan dan kelaparan. Negara-negara dengan pendapatan yang sangat timpang cenderung memiliki tingkat produktivitas lahan yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap kerawanan pangan.

Proporsi perempuan dan anak perempuan mencapai hampir setengah dari tenaga kerja pertanian di negara berkembang. Namun demikian, perempuan yang bekerja di bidang pertanian mengalami banyak kendala seperti kurangnya akses ke pelatihan pertanian, kesulitan dalam mengakses kepemilikan lahan, layanan penyuluhan, dan keuangan.

**Salah satu alat untuk memantau pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian adalah melalui Indikator TPB 5.a.1** yakni proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian dan proporsi penduduk pertanian perempuan sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian.

*Gender equality defined as a condition when everyone, both men and women, has equal rights, responsibilities and opportunities. Gender equality is not only a fundamental human right, but also a necessary foundation for a world that is peaceful, prosperous and sustainable.*

*Addressing gender inequality is essential to achieving sustainability in the agricultural sector. Still high levels of inequality can make it difficult to increase productivity and reduce poverty and hunger. Countries with very unequal incomes tend to have lower levels of land productivity and are more vulnerable to food insecurity.*

*The proportion of women and girls comprises nearly half of the agricultural workforce in developing countries. However, women who work in agriculture experience many obstacles, such as lack of access to agricultural training, difficulties in accessing land ownership, extension services and finance.*

*One of the tools to monitor women's empowerment in the agricultural sector is through the SDG indicator 5.a.1, namely the proportion of agricultural residents who have rights to agricultural land and the proportion of female agricultural residents who own or have rights to agricultural land.*









02

## Perkembangan Terkini TPB Nasional

*Current Development of  
National SDGs*



# Perkembangan Terkini TPB Nasional

## Current Development of National SDGs

Di Indonesia, pelaksanaan TPB telah memberikan perubahan yang positif dan cukup banyak kinerja yang telah dicapai baik di tingkat global maupun nasional. Indonesia sudah membuat banyak pencapaian, seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, dimana tercatat terdapat 17,75 persen penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 dan terus mengalami penurunan hingga tersisa 9,78 persen penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020.

*In Indonesia, the implementation of the SDGs has provided positive changes and quite a lot of performance has been achieved both at the global and national levels. Indonesia has made many achievements, such as the poverty rate which continues to decrease, where there were 17.75 percent of poor people in Indonesia in March 2006 and continues to decline until the remaining 9.78 percent of the poor in Indonesia in March 2020.*



Sumber/Source:

Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, BPS  
Poverty Profile in Indonesia March 2020, BPS

Demikian halnya dengan tingkat literasi nasional yang terus mengalami peningkatan, ditandai dengan banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis sebanyak 99,78 persen pada tahun 2020.

*Likewise, the national literacy rate continues to increase, marked by the number of people aged 15-24 years who can read and write as much as 99.78 percent in 2020.*

## Tingkat Literasi Nasional

National Literacy Rate



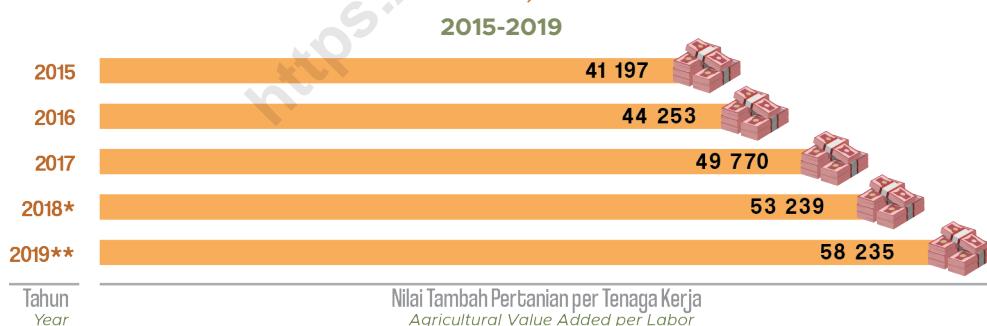
Sumber/Source: BPS

Pencapaian dalam sektor pertanian terkait tujuan ke-2 TPB ditunjukkan dengan nilai tambah pertanian per tenaga kerja secara nasional mengalami peningkatan selama kurun waktu 2015-2019 dari 41.197 ribu rupiah per tenaga kerja pada tahun 2015 menjadi 58.235 ribu rupiah per tenaga kerja pada tahun 2019. Semakin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani menunjukkan kesejahteraan tenaga kerja sektor pertanian.

Achievements in the agricultural sector related to the 2nd goal of the SDGs are shown by the added value of agriculture per workforce nationally that has increased during the 2015-2019 period from 41,197 thousand rupiah per workforce in 2015 to 58,235 thousand rupiah per workforce in 2019. The greater the income or labor / farmer income shows the welfare of agricultural sector workers.

## Nilai Tambah Pertanian Dibagi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (Ribu Rupiah per Tenaga Kerja)

Agricultural Value Added by Number of Workers in the Agricultural Sector (Thousands of Rupiah per Labor)



Catatan/Notes: \* Angka Sementara/ Temporary Figures  
\*\* Angka Sangat Sementara/ Very Provisional Figures

Sumber/Source: BPS

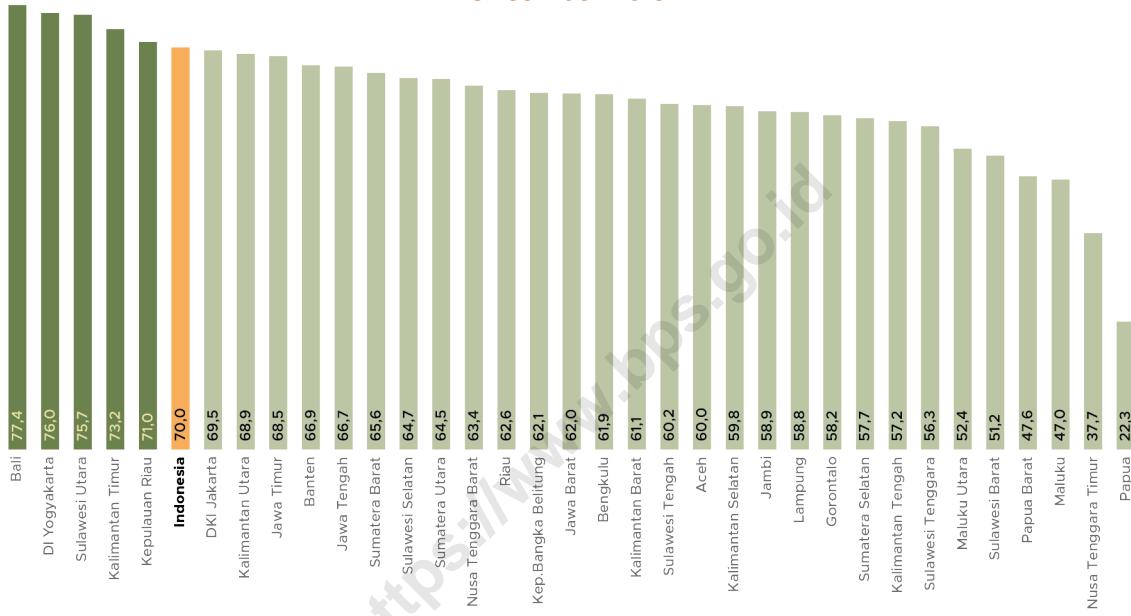
Sejak tahun 2016, Indonesia juga telah mengimplementasikan agenda pembangunan global TPB ke dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, suatu pengukuran sangat dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan TPB serta dapat melacak kinerja negara dalam pencapaian 17 Tujuan TPB. Salah satu upaya paling popular dalam mengukur capaian TPB yang dilakukan adalah dengan menggunakan Indeks TPB.

Since 2016, Indonesia has also implemented the SDGs global development agenda into national development. Therefore, a measurement is needed to monitor and evaluate the progress of the SDGs and to track the country's performance in achieving the 17 SDGs Goals. One of the most popular attempts to measure SDGs achievement is by using the SDGs Index.

Indeks TPB merupakan indeks komposit yang secara ideal mengukur konsep multidimensi TPB yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu indikator. Indeks TPB Indonesia secara sederhana dapat diartikan sebagai nilai capaian optimal. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis kajian awal indeks TPB di Indonesia menurut provinsi.

The SDGs index is a composite index that ideally measures the multidimensional concept of SDGs that cannot be explained by just one indicator. The Indonesian SDGs Index can simply be interpreted as the optimal performance value. In 2019, the Central Statistics Agency (BPS) has released an initial study of the SDGs index in Indonesia by province.

## Indeks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2019 *SDGs Index 2019*



### Indonesia tidak boleh lengah,

karena masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa, dimana hanya 50,8% perempuan di angkatan kerja dibanding laki-laki 82%, dan masih 8,84% masyarakat Indonesia belum menikmati listrik, serta 37% atau 9 juta anak mengalami *stunting*. Selain itu juga tantangan yang dihadapi lainnya adalah kebakaran dan kerusakan hutan, kekerasan terhadap perempuan yaitu 1 dari 3 orang perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, sampah plastik yang dapat merusak lingkungan dengan jumlah setiap tahunnya mencapai 8 juta ton sampah plastik yang beredar di lautan dunia, sehingga jika hal ini dibiarkan maka sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan, pengangguran anak muda yang masih sangat tinggi yaitu sekitar 7 juta pengangguran terdapat

4 juta diantaranya adalah kaum muda berusia 15-24 tahun.

---

### *Indonesia must not be careless,*

*because there are still many challenges that lie ahead. Social inequality is still very pronounced, where only 50.8% of women in the labor force compared to 82% of men, and 8.84% of Indonesians still do not enjoy electricity, and 37% or 9 million children are stunted. In addition, other challenges faced are fires and forest destruction, violence against women, namely 1 in 3 women who have experienced physical and / or sexual violence, plastic waste that can damage the environment with an annual amount of up to 8 million tons of plastic waste circulating in oceans of the world, so that if this is allowed, plastic waste in the oceans will be more than the number of fish, unemployment of young people is still very high, namely around 7 million unemployed, 4 million of whom are young people aged 15-24 years.*

Pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini harus segera kita tuntaskan bersama. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama agar tujuan TPB/SDGs di Indonesia dapat tercapai dan menyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal.

*We must finish the unfinished work together. All of these challenges we can overcome only if we move together. Let's build Indonesia together so that the goals of the TPB / SDGs in Indonesia can be achieved and ensure that no one is left behind.*







# 03

## Indikator TPB Sektor Pertanian

*SDGs Indicator Agricultural  
Sector*



# Target 2.3

## Target 2.3

“

Pada tahun 2030 terdapat penggandaan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, termasuk mendapatkan akses yang aman dan setara terhadap lahan, sumber daya dan input produktif lainnya seperti pengetahuan, layanan keuangan, pasar, peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.

By 2030 there will be a doubling of agricultural productivity and the income of small-scale food producers, including having safe and equal access to land, resources and other productive inputs such as knowledge, financial services, markets, opportunities for value addition and non-agricultural employment.

“

### Produsen Pangan Skala Kecil

Small Scale Food Producer

Produsen pangan (petani) skala kecil adalah produsen yang secara struktural tidak tergantung pada tenaga kerja upahan tetap dan yang mengelola kegiatan produksinya terutama dengan pekerja keluarga. Sebagian besar waktu kerja dihabiskan untuk kegiatan pertanian di lahan pertanian sendiri atau di rumah mereka sendiri. Pendapatan pertanian ini merupakan bagian utama dari total pendapatan mereka.

Petani skala kecil diyakini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pangan dunia. Di sisi lain, mereka juga diperkirakan sebagai yang paling miskin dan rawan pangan. Namun, diakui secara luas bahwa petani skala kecil adalah salah satu tenaga kerja utama yang memproduksi pangan, dan karena mereka berada dalam posisi yang relatif rentan, maka penting untuk mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada mereka.

Small-scale food producers (farmers) are producers who are structurally not dependent on fixed wage labor and who manage their production activities, especially with family workers. Most of the working time is spent on agricultural activities on their own farms or in their own homes. This agricultural income is a major part of their total income.

Small-scale farmers are believed to be able to contribute significantly to world food. On the other hand, they are also estimated to be the poorest and most food insecure. However, it is widely recognized that small-scale farmers are one of the main workforce producing food, and because they are in a relatively vulnerable position, it is important to promote development policies on their side.



## Mengapa penting untuk fokus kepada Petani Skala Kecil

Why is it important to focus on Small-Scale Farmers



1

### Ketahanan pangan dan gizi Food and nutrition security

Seseorang dianggap aman pangan jika memiliki ketersediaan dan akses yang memadai setiap saat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk mempertahankan hidup yang sehat dan aktif.

*A person is considered food safe if he has adequate availability and access at all times to sufficient, safe and nutritious food to maintain a healthy and active life.*



2

### Kehidupan pedesaan yang berkelanjutan Sustainable rural life

Kehidupan dapat diartikan sebagai kemampuan, aset dan aktivitas, yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal finansial. Dalam lingkup indikator 2.3.1. dan 2.3.2, fokus utamanya adalah pada keberlanjutan dan ketahanan kehidupan yang terletak di daerah pedesaan.

*Life can be defined as abilities, assets and activities, which consist of human capital, social capital, natural capital, physical capital and financial capital. Within the scope of indicators 2.3.1. and 2.3.2, the main focus is on the sustainability and survival of those located in rural areas.*



3

### Produksi pangan global Global food production

Karena unit produksi yang lebih kecil terdistribusi dengan lebih baik di wilayah tertentu dan menyediakan pangan yang lebih beraneka ragam, stabilitas petani skala kecil secara langsung berkontribusi pada produksi pangan global dan meningkatkan pasokan pangan lokal dan sehat.

*Because smaller production units are better distributed in certain regions and provide a more diverse diet, the stability of small-scale farmers directly contributes to global food production and increases local and healthy food supplies.*



Sejumlah literatur ilmiah dan dokumen kebijakan mengkategorikan **penentuan Petani skala kecil pada empat kriteria:** luas lahan yang dikelola, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk produksi pertanian (terutama anggota keluarga), orientasi pasar dan ukuran ekonomi dari unit usaha.

*A number of scientific literature and policy documents categorize **the determination of small-scale farmers on four criteria:** the area of land managed, the number of workers employed for agricultural production (especially family members), market orientation and the economic size of the business unit.*

Pada Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, **kriteria yang digunakan untuk menentukan Petani Skala Kecil dirangkum menjadi 2 kriteria**, yakni ukuran fisik dan ukuran ekonomi dari usaha pertanian.

*In the 2020 Integrated Agriculture Survey (SITASI), **the criteria used to determine Small-Scale Farmers are summarized into 2 criteria**, namely the physical size and economic size of the agricultural business.*

## 1

### Ukuran fisik usaha pertanian

*The physical size of the agricultural business*

#### a. Luas lahan yang dikelola

*The area of land managed*



##### Termasuk:

- Lahan bera (sedang tidak ditanami selama waktu tertentu)
- Lahan dikelola untuk tanaman musiman/ tahunan
- Lahan disewa

##### *Including:*

- Fallow land (not being planted for a certain time)
- The land is managed for seasonal / annual crops
- Land for rent

##### Tidak Termasuk:

- Lahan hutan
- Lahan telantar
- Lahan disewakan

##### *Not included:*

- Forest land
- Abandoned land
- Land for lease

#### b. Jumlah ternak yang dipelihara

*Number of livestock kept*



Ukuran peternakan diukur dalam Tropical Livestock Unit (TLU)/ Unit Ternak Tropikal.

TLU adalah unit perbandingan ternak yang digunakan untuk membandingkan ukuran relatif dari suatu kawanan. TLU pada dasarnya merupakan ‘exchange ratio’ di antara spesies ternak, diperoleh dengan mengubah berat badan menjadi berat metabolik.

*Farm size is measured in the Tropical Livestock Unit (TLU) / Tropical Livestock Unit.*

*TLU is a unit of ratio of livestock used to compare the relative sizes of a herd. TLU is basically an ‘exchange ratio’ among livestock species, obtained by converting body weight to metabolic weight.*

2

## Ukuran ekonomi usaha pertanian

### *The size of the agricultural business economy*



Ukuran ekonomi diukur berdasarkan pendapatan total produksi pertanian. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sebanding di berbagai negara, pendapatan dinyatakan dalam **Purchasing Power Parity (PPP) Dollar** atau **Paritas Daya Beli** (nilai mata uang US\$).

The size of the economy is measured by the total income of agricultural production. However, to obtain comparable results across countries, revenues are expressed in **Purchasing Power Parity (PPP) Dollars**.

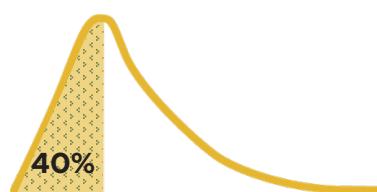
Paritas Daya Beli adalah indikator yang memungkinkan perbandingan daya beli masing-masing negara dengan menggunakan tidak hanya nilai tukar, tetapi juga harga pasar dari sekeranjang barang, jika dibayar dalam dollar. Penurunan daya beli salah satu mata uang akan menyebabkan penurunan proporsional dalam penilaian mata uang tersebut di pasar valuta asing.

*PPP is an indicator that allows a comparison of the purchasing power of individual countries using not only the exchange rate, but also the market price of a basket of goods, if paid in dollars.*

A decrease in the purchasing power of one of the currencies will cause a proportional decrease in the valuation of that currency on the foreign exchange market.

Dari 2 kriteria yang digunakan tersebut, **ditentukan ambang batas 40% distribusi terbaawah atau 2 (dua) kuintil distribusi** berdasarkan rekomendasi para ahli dan juga digunakan oleh Bank Dunia untuk pengukuran kesejahteraan. Ambang batas ini digunakan secara khusus untuk memantau indikator 2.3.1 dan indikator 2.3.2.

From the 2 criteria used, the **threshold for the lowest 40% distribution or 2 (two) distribution quintiles is determined** based on the recommendations of experts and is also used by the World Bank to measure welfare. This threshold is used specifically to monitor indicator 2.3.1 and indicator 2.3.2.



## 1. Ukuran Lahan *Land Size*

Ambang batas untuk ukuran luas lahan yang dikelola pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat sebesar **0,16 hektar**.

The threshold for the size of land area under management in the Provinces of West Java, East Java and West Nusa Tenggara is **0.16 hectares**

## 2. Jumlah ternak

Ambang batas untuk jumlah ternak yang dipelihara pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat sebesar **0,61 unit ternak tropikal (TLU)**.

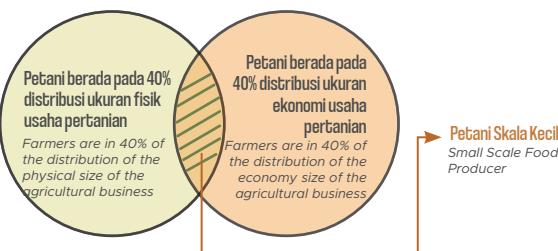
The threshold for the number of livestock kept in the Provinces of West Java, East Java and West Nusa Tenggara is **0,61** tropical livestock units (TLU).

### **3. Pendapatan**

*Income*

Ambang batas untuk pendapatan pada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat sebesar US\$ 1044.169 PPP.

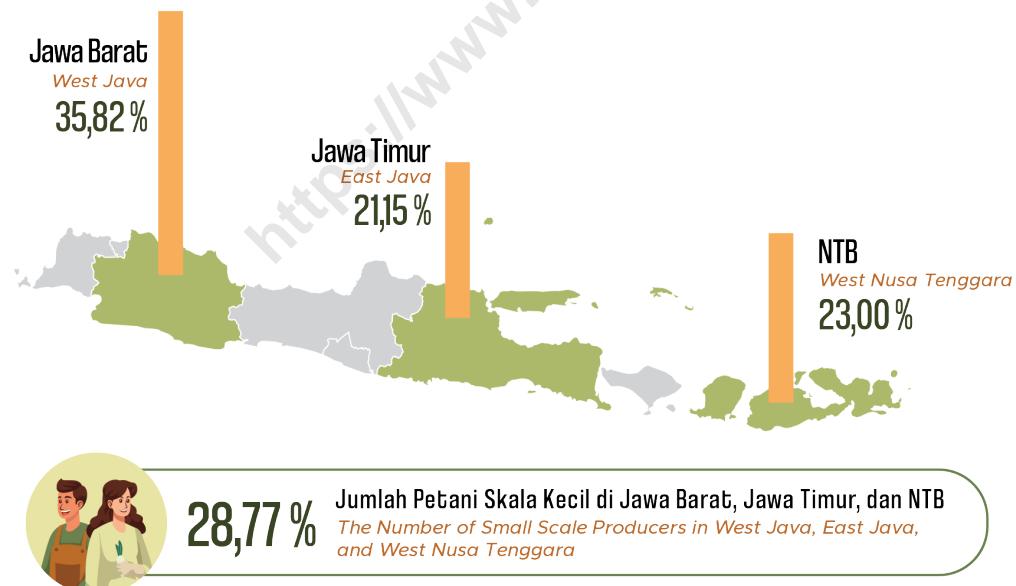
The threshold for income in the provinces of West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is **US \$ 1044,169**  
**PPP.**



Dari ketiga ambang batas yang telah ditentukan, seseorang hanya dapat disebut sebagai petani skala kecil jika dalam kurun waktu setahun mengelola lahan seluas kurang dari 0,16 hektar, memelihara ternak kurang dari 0,61 unit ternak tropikal, dan memperoleh pendapatan kurang dari US\$ 1044, 169 PPP, atau dengan kata lain memenuhi ketiganya.

*Of the three predetermined thresholds, a person can only be called a small-scale farmer if within a year they manage less than 0,16 hectares of land, raise less than 0,61 units of tropical livestock, and earn less than US \$ 1044, 169 PPP, or in other words fulfilled all three.*

### Jumlah Petani Skala Kecil *The Number of Small Scale Producers*



Berdasarkan penentuan ambang batas tersebut, diperkirakan jumlah petani skala kecil di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat hanya sebanyak 28,77 persen dari total usaha pertanian yang ada. Jika dikelompokkan menurut provinsi, ditemukan sebanyak 35,82 persen petani skala kecil di provinsi Jawa Barat, 21,15 persen petani skala kecil di provinsi Jawa Timur, dan 23 persen petani skala kecil di provinsi Nusa Tenggara Barat.

*Based on the determination of the threshold, it is estimated that the number of small-scale farmers in the provinces of West Java, East Java and West Nusa Tenggara is only 28.77 percent of the total existing agricultural businesses. If grouped by province, it was found that 35.82 percent of small-scale farmers in West Java province, 21.15 percent of small-scale farmers in East Java province, and 23 percent of small-scale farmers in West Nusa Tenggara province.*

## Indikator TPB 2.3.1

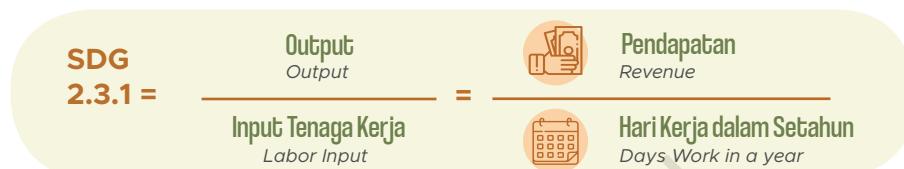
### SDGs Indicator 2.3.1

Indikator 2.3.1 digunakan untuk mengukur berapa banyak volume yang dapat diproduksi per unit tenaga kerja yaitu rata-rata produktivitas tenaga kerja.

Indicator 2.3.1 is used to measure how much volume can be produced per unit of labor, namely the average productivity of labor.

## Metodologi

### Methodology



## Hasil

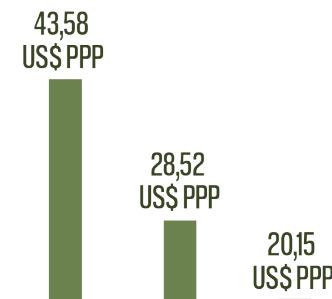
### Result

#### Petani Skala Kecil di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dapat menghasilkan

*Small Scale Producers in West Java, East Java and West Nusa Tenggara can earn*

**36,30 US\$ PPP**

per hari kerja/ *per working day*



Berdasarkan hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, petani skala kecil di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dapat menghasilkan US\$ 36,3 PPP per hari kerja. Jika dikategorikan menurut provinsi, maka petani skala kecil di provinsi Jawa Barat diperkirakan dapat menghasilkan US\$ 43,58 PPP per hari kerja. Selanjutnya, petani skala kecil di provinsi Jawa Timur diperkirakan dapat menghasilkan US\$ 28,52 PPP per hari kerja. Dan petani skala kecil di provinsi Nusa Tenggara Barat diperkirakan dapat menghasilkan US\$ 20,15 PPP per hari kerja.

Based on the results of the 2020 Integrated Agriculture Survey (SITASI), small-scale farmers in the Provinces of West Java, East Java and West Nusa Tenggara can earn US \$ 36.3 PPP per working day. If categorized by province, it is estimated that small-scale farmers in West Java can earn US \$ 43.58 PPP per work day. Furthermore, small-scale farmers in East Java province are estimated to be able to generate US \$ 28.52 PPP per work day. And small-scale farmers in West Nusa Tenggara province are estimated to generate US \$ 20.15 PPP per work day.

## Indikator TPB 2.3.2

### SDGs Indicator 2.3.2

Indikator 2.3.2 mengacu pada pendapatan bersih aktual yang diperoleh produsen makanan (petani) skala kecil dari kegiatan pertanian mereka. Dengan kata lain, indikator ini digunakan untuk mengukur pendapatan rata-rata dari petani skala kecil.

*Indicator 2.3.2 refers to the actual net income that small-scale food producers (farmers) receive from their agricultural activities. In other words, this indicator is used to measure the average income of small-scale farmers.*

## Metodologi

### Methodology

**SDG  
2.3.2 =**



Pendapatan  
Revenue

—



Biaya  
Cost

+

Variasi Stok (jika tersedia)  
Stock Variation (if available)

## Dalam Setahun Petani Skala Kecil di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dapat menghasilkan

*In a Year, Small Scale Producers in West Java, East Java and West Nusa Tenggara can earn*

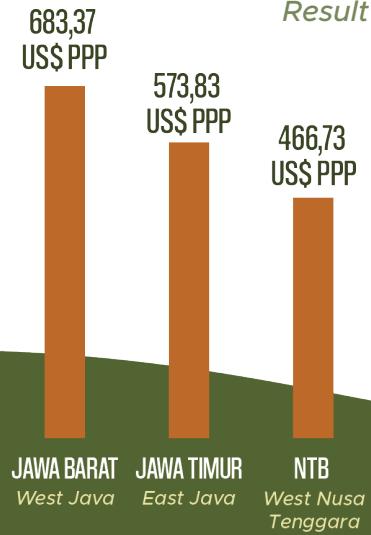
**641,97 US\$ PPP**



Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020 menunjukkan bahwa pada kurun waktu setahun, petani skala kecil di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dapat menghasilkan US\$ 641,97 PPP.

Menurut provinsi, petani skala kecil di Jawa Barat dapat menghasilkan US\$ 683,37 PPP dalam kurun waktu setahun. Di provinsi Jawa Timur, petani skala kecil hanya menghasilkan US\$ 573,83 PPP dalam periode setahun. Sedangkan petani skala kecil di provinsi Nusa Tenggara Barat hanya menghasilkan US\$ 466,73 PPP dalam kurun waktu setahun.

## Hasil Result



*The results of the 2020 Integrated Agriculture Survey (SITASI) show that over the course of a year, small-scale farmers in the provinces of West Java, East Java and West Nusa Tenggara can generate US \$ 641.97 PPP.*

*By province, small-scale farmers in West Java can generate US \$ 683.37 PPP over the course of a year. In East Java province, small-scale farmers only generate US \$ 573.83 PPP in a year. Meanwhile, small-scale farmers in West Nusa Tenggara province only generated US \$ 466.73 PPP in a year.*

# Target 2.4

## Target 2.4

“

*Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu memelihara ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta yang secara progresif memperbaiki lahan dan kualitas tanah*

*By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality*

“

### Indikator TPB 2.4.1

#### SDGs Indicator 2.4.1

Indikator 2.4.1 dirancang untuk mengukur sejauh mana sistem produksi pangan yang lebih produktif dan berkelanjutan itu diterapkan. Indikator ini juga menyajikan informasi strategis bagi para pembuat keputusan untuk kebijakan di bidang pertanian.

*SDGs 2.4.1 was designed to measure the extent to which a more productive and sustainable food production system is implemented. This indicator also provides strategic information for policy decision makers in agriculture.*

### Metodologi

#### Methodology

Indikator 2.4.1 diformulasikan sebagai berikut:  
*The Indicator 2.4.1 is expressed by the following formula:*

**SDG  
2.4.1 =**

Lahan pertanian yang pengelolaannya di bawah batas kriteria produktif dan petanian berkelanjutan

*Area under productive and sustainable agriculture*

Luas Lahan Pertanian  
*Agricultural land area*

Indikator 2.4.1 mencerminkan berbagai dimensi keberlanjutan: ekonomi, lingkungan dan sosial dengan **11 (sebelas) tema** dan **11 (sebelas) sub-indikator**

*Indicator 2.4.1 reflects various dimensions of sustainability: economic, environmental and social with **11 (eleven) themes** and **11 (eleven) sub-indicators***

Dimensi Dimensions	Tema Themes	Sub Indikator Sub Indicators
 <b>ECONOMI</b> <i>Land Productivity</i>	1. Produktivitas Lahan <i>Land Productivity</i>	Nilai produksi per hektar <i>Land Productivity</i>
	2. Profitabilitas <i>Profitability</i>	Pendapatan bersih petani <i>Net farm income</i>
	3. Ketahanan <i>Resilience</i>	Mekanisme mitigasi risiko <i>Risk mitigation mechanism</i>
	4. Kesuburan tanah <i>Soil health</i>	Prevalensi degradasi tanah <i>Prevalence of soil degradation</i>
 <b>LINGKUNGAN</b> <i>Environmental</i>	5. Penggunaan air <i>Water use</i>	Kondisi ketersediaan air <i>Variation in water availability</i>
	6. Risiko penggunaan pupuk <i>Fertilizer pollution risk</i>	Manajemen penggunaan pupuk <i>Management of fertilizers</i>
	7. Risiko penggunaan pestisida <i>Pesticide risk</i>	Manajemen penggunaan pestisida <i>Management of pesticides</i>
	8. Keanekaragaman hayati <i>Biodiversity</i>	Praktik dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro <i>Use of biodiversity-supportive practices</i>
 <b>SOSIAL</b> <i>Social</i>	9. Pekerjaan yang layak <i>Decent employment</i>	Besaran upah di pertanian <i>Wage rate in agriculture</i>
	10. Kemananan pangan <i>Food security</i>	Food Insecurity Experience Index (FIES)
	11. Kepemilikan lahan <i>Land tenure</i>	Hak kepemilikan lahan <i>Secure tenure rights to land</i>

Menggunakan kriteria dan ambang batas keberlanjutan, hasil untuk setiap sub-indikator disajikan dalam 3 (tiga) spektrum

*Using sustainability criteria and thresholds, the results for each sub-indicator are presented in 3 (three) spectrums*



**HIJAU / Green**  
Diharapkan  
Desirable



**KUNING / Yellow**  
Dapat Diterima  
Acceptable



**MERAH / Red**  
Tidak Berkelanjutan  
Unsustainable

	Diharapkan Desirable	Dapat Diterima Acceptable	Tidak Berkelanjutan Unsustainable
<b>SUB-INDIKATOR 1:</b> Nilai produksi per hektar	Produktivitas pertanian adalah $\geq 2/3$ dari persentil ke-90 distribusi data nilai produksi per hektar.	Produktivitas pertanian adalah $\geq 1/3$ dan $< 2/3$ dari persentil ke-90 distribusi data nilai produksi per hektar	Produktivitas pertanian adalah $< 1/3$ dari persentil ke-90 distribusi data nilai produksi per hektar
Farm Output Value Per Hectare	The farm FOVH is equal to or greater than the value corresponding to 2/3 of the 90th percentile	the farm FOVH is equal to or greater than the value corresponding to 1/3 but less than 2/3 of the 90th percentile	the farm FOVH is less than the value corresponding to 1/3 of the 90th percentile





	Diharapkan Desirable	Dapat Diterima Acceptable	Tidak Berkelaanjutan Unsustainable
<b>SUB-INDIKATOR 2:</b> Pendapatan Bersih Petani <i>Net Farm Income</i>	Ada keuntungan yang diperoleh setiap tahun selama tiga tahun terakhir  <i>NFI/profitability is above zero for all past 3 consecutive years</i>	Ada keuntungan yang diperoleh paling tidak dalam satu tahun selama tiga tahun terakhir  <i>NFI/profitability is above zero for at least 1 of the past 3 consecutive years</i>	Tidak pernah ada keuntungan sama sekali yang diperoleh selama 3 tahun terakhir  <i>NFI/profitability is below zero for all of the past 3 consecutive years</i>
<b>SUB-INDIKATOR 3:</b> Mekanisme Mitigasi Risiko <i>Risk Mitigation Mechanisms</i>	Mempunyai atau tersedia akses terhadap paling tidak 2 dari 3 mekanisme mitigasi risiko  <i>Access to or availed at least two of three mitigation mechanisms</i>	Mempunyai atau tersedia akses paling tidak 1 dari 3 mekanisme mitigasi risiko  <i>Access to or availed at least one of the three mitigation mechanisms</i>	Tidak mempunyai atau tidak tersedia satu pun dari 3 mekanisme mitigasi risiko  <i>No access to the three mitigation mechanisms</i>
<b>SUB-INDIKATOR 4:</b> Prevalensi Degradasi Tanah  <i>Prevalance of Soil Degradation</i>	Luas lahan yang dipengaruhi oleh salah satu dari empat ancaman yang dipilih terhadap kesuburan tanah kurang dari 10 persen dari total luas lahan pertanian  <i>The combined area affected by any of the four selected threats to soil health is less than 10% of the total agriculture area of the farm</i>	Luas lahan yang dipengaruhi oleh salah satu dari empat ancaman yang dipilih terhadap kesuburan tanah antara 10 s.d. 50 persen dari total luas lahan pertanian  <i>The combined area affected by any of the four selected threats to soil health is between 10% and 50% of the total agriculture area of the farm</i>	Luas lahan yang dipengaruhi oleh salah satu dari empat ancaman yang dipilih terhadap kesuburan tanah lebih dari 50 persen dari total luas lahan pertanian  <i>The combined area affected by any of the four selected threats to soil health is above 50% of the total agriculture area of the farm</i>
<b>SUB-INDIKATOR 5:</b> Kondisi Ketersediaan Air  <i>Variation in Water Availability</i>	Ketersediaan air tetap stabil selama bertahun-tahun untuk pertanian yang mengairi lebih dari 10% area pertanian. Hasil default untuk pertanian yang mengairi kurang dari 10% area pertanian mereka  <i>Water availability remains stable over the years for farms irrigating crops on more than 10% of its agriculture area. Default result for farms irrigating less than 10% of their agricultural area</i>	Ketersediaan air untuk mengairi tanaman setidaknya 10% dari area pertanian, tetapi petani tidak mengetahui apakah ketersediaan air tetap stabil selama bertahun-tahun, atau pernah mengalami pengurangan ketersediaan air tetapi ada organisasi yang secara efektif mengalokasikan air di antara pengguna  <i>uses water to irrigate crops on at least 10% of the agriculture area of the farm, does not know whether water availability remains stable over the years, or experiences reduction on water availability over the years, but there is an organisation that effectively allocates water among users</i>	Ketersediaan air kurang dari 10% area pertanian mereka  <i>in all other cases</i>
<b>SUB-INDIKATOR 6:</b> Manajemen Penggunaan Pupuk  <i>Management of fertilizers</i>	Petani menggunakan pupuk tetapi paling tidak terdapat 4 ukuran spesifik mitigasi risiko penggunaan pupuk yang diperhatikan. Termasuk dalam hal ini petani yang tidak menggunakan pupuk  <i>The farm uses fertilizers but take at least 4 specific measures to mitigate environmental risks. Default result for farms not using fertilizers</i>	Petani menggunakan pupuk tetapi paling tidak terdapat 2 ukuran spesifik mitigasi risiko penggunaan pupuk yang diperhatikan  <i>The farm uses fertilizers and takes at least two measures to mitigate environmental risks</i>	Petani menggunakan pupuk tetapi tidak ada satu pun ukuran spesifik mitigasi risiko penggunaan pupuk yang diperhatikan  <i>The farm uses fertilizer and does not take any of the specific measures to mitigate environmental risks</i>

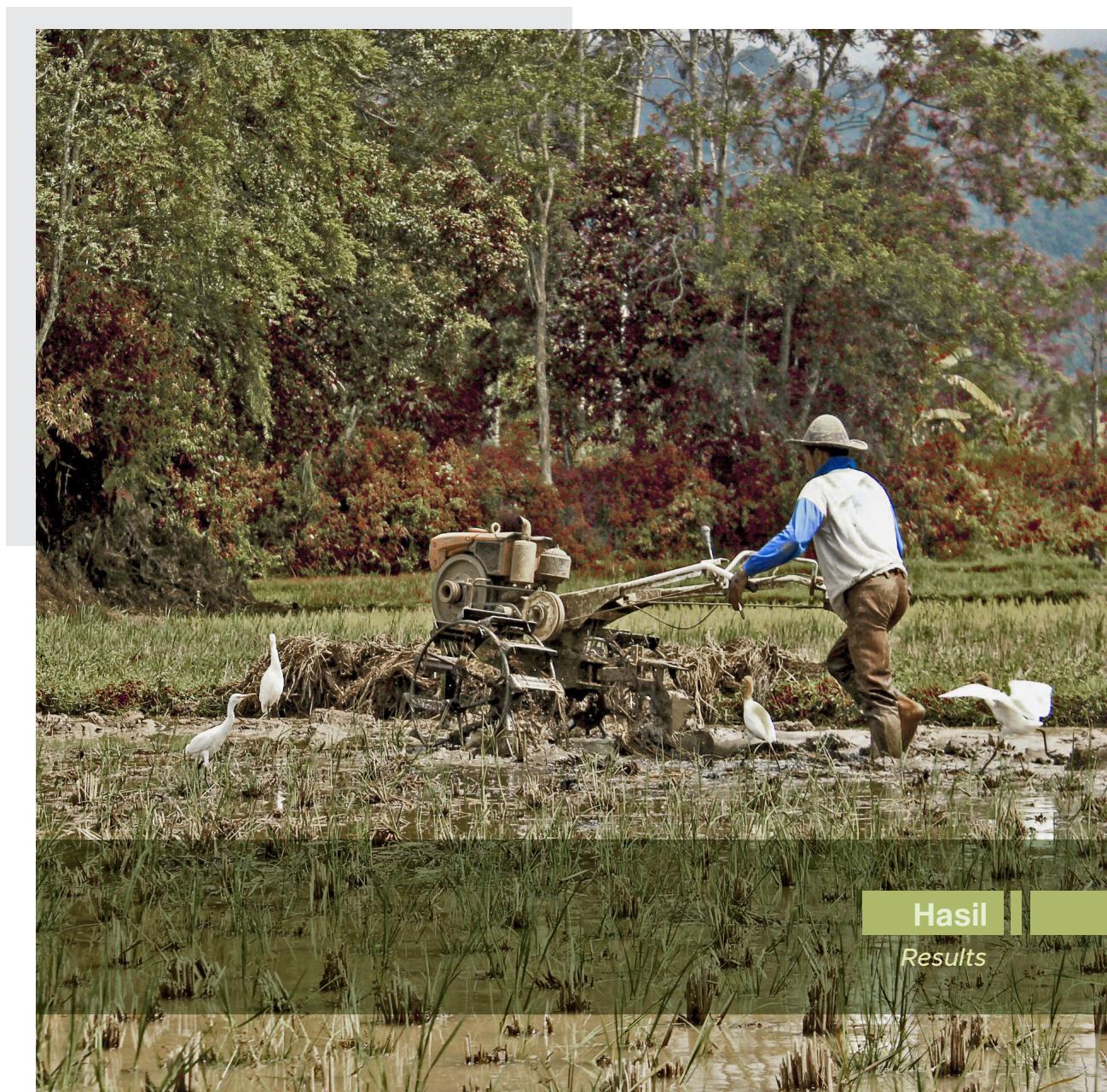


	Diharapkan <i>Desirable</i>	Dapat Diterima <i>Acceptable</i>	Tidak Berkelanjutan <i>Unsustainable</i>
<b>SUB-INDIKATOR 7:</b> Manajemen Penggunaan Pestisida	Petani hanya menggunakan pestisida dengan risiko kecil (WHO Kelas II atau III). Dalam hal ini, petani mematuhi ketiga langkah yang berhubungan dengan kesehatan dan setidaknya empat dari tujuh langkah yang terkait dengan lingkungan. Termasuk dalam hal ini petani yang tidak menggunakan pestisida	Petani hanya menggunakan pestisida dengan risiko kecil (WHO Kelas II atau III) dan mematuhi setidaknya dua langkah masing-masing dari tindakan yang terkait dengan kesehatan dan lingkungan	Petani menggunakan pestisida yang berbahaya atau sangat berbahaya (WHO Kelas Ia atau Ib), pestisida ilegal, atau menggunakan pestisida yang cukup atau sedikit berbahaya tanpa mengambil langkah-langkah khusus untuk mengurangi risiko lingkungan atau kesehatan yang terkait dengan penggunaannya (kurang dari dua dari setiap kategori)
Management of Pesticides	<i>The farm uses only moderately or slightly hazardous pesticides (WHO Class II or III). In this case, it adheres to all three health-related measures and at least four out of seven of the environment-related measures. Default result for farms not using pesticides</i>	<i>The farm uses only moderately or slightly hazardous pesticides (WHO Class II or III) and takes at least two measures each from health and environment related measures</i>	<i>The farm uses highly or extremely hazardous pesticides (WHO Class Ia or Ib), illegal pesticides, or uses moderately or slightly hazardous pesticides without taking specific measures to mitigate environmental or health risks associated with their use (fewer than two from each category)</i>
<b>SUB-INDIKATOR 8:</b> Praktik dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro	<p><b>ORGANIK</b></p> <p>Petani menerapkan paling tidak tiga dari kriteria keberlanjutan pertanian organik yang ditentukan</p> <p><i>The agricultural holding meets at least three of the above criteria</i></p>	<p>Petani menerapkan paling tidak satu dari kriteria keberlanjutan pertanian organik yang ditentukan</p> <p><i>The agricultural holding meets at least one of the above criteria</i></p>	<p>Petani tidak menerapkan satupun kriteria keberlanjutan pertanian organik yang ditentukan</p> <p><i>The agricultural holding meets none of the above criteria</i></p>
Use Of Agro-Biodiversity-Supportive Practices	<p><b>NON-ORGANIK</b></p> <p>Petani menerapkan paling tidak dua dari kriteria keberlanjutan pertanian organik yang ditentukan</p> <p><i>The agricultural holding meets at least two of the above criteria</i></p>	<p>Petani menerapkan paling tidak satu dari kriteria keberlanjutan pertanian organik yang ditentukan</p> <p><i>The agricultural holding meets at least one of the above criteria</i></p>	<p>Petani tidak menerapkan satupun kriteria keberlanjutan pertanian organik yang ditentukan</p> <p><i>The agricultural holding meets none of the above criteria</i></p>
<b>SUB-INDIKATOR 9:</b> Besarannya upah di pertanian	Jika rata-rata upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak terlatih (pekerja lepas) lebih dari upah minimum nasional atau upah minimum pekerja sektor pertanian (jika tersedia). Termasuk dalam hal ini unit usaha yang tidak menggunakan tenaga kerja dibayar	Jika rata-rata upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak terlatih (pekerja lepas) sama dengan upah minimum nasional atau upah minimum pekerja sektor pertanian (jika tersedia)	Jika rata-rata upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak terlatih (pekerja lepas) lebih kecil dari upah minimum nasional atau upah minimum pekerja sektor pertanian (jika tersedia)
Wage Rate in Agriculture	<i>If the wage rate paid to unskilled labour is above the minimum national wage rate or minimum agricultural sector wage rate (if available). Default result for farms not hiring labour</i>	<i>if the wage rate paid to unskilled labour is equals to the minimum national wage rate or minimum agricultural sector wage rate (if available)</i>	<i>if the wage rate paid to unskilled labour is below the minimum national wage rate or minimum agricultural sector wage rate (if available)</i>
<b>SUB-INDIKATOR 10:</b> Food Insecurity Experience Index (FIES)	Kerawanan pangan ringan: jika peluang rumah tangga petani menjadi rawan pangan sedang hingga berat kurang dari 0,5 dan peluang rawan pangan parah adalah kurang dari 0,5	Kerawanan pangan sedang: jika peluang rumah tangga petani menjadi rawan pangan sedang hingga parah lebih besar dari 0,5 dan peluang rawan pangan parah kurang dari 0,5	Kerawanan pangan parah: jika peluang rumah tangga petani menjadi rawan pangan parah lebih besar dari 0,5
	<i>Mild food insecurity: if the probability of a household of the holder of the holding to be moderate to severe food insecure is less than 0.5 and the probability to be severe food insecure is less than 0.5</i>	<i>Moderate food insecurity: if the probability of a household of the holder of the holding to be moderate to severe food insecure is greater than 0.5 and the probability to be severe food insecure is less than 0.5</i>	<i>Severe food insecurity: if the probability of a household of the holder of the holding to be severe food insecure is greater than 0.5</i>





	Diharapkan Desirable	Dapat Diterima Acceptable	Tidak Berkelanjutan Unsustainable
<b>SUB- INDIKATOR 11:</b> Hak kepemilikan lahan	Mempunyai dokumen resmi kepemilikan lahan dengan nama petani tercatat dalam dokumen kepemilikan, atau petani mempunya hak untuk menjual dan mewariskan  <i>Secure Tenure Rights to Land</i>	Mempunyai dokumen resmi walaupun bukan nama petani yang tercatat dalam dokumen kepemilikan lahan tersebut  <i>has a formal document with the name of the holder/holding on it, or has the right to sell or bequeath any of the parcel of the holding</i>	Tidak mempunyai dokumen kepemilikan lahan serta tidak mempunyai hak untuk menjual dan mewariskan  <i>no positive responses to any of the criteria listed</i>



Hasil  
Results



SUB-  
INDIKATOR 1: 

Nilai Produksi per Hektar  
Farm Output Value Per Hectare

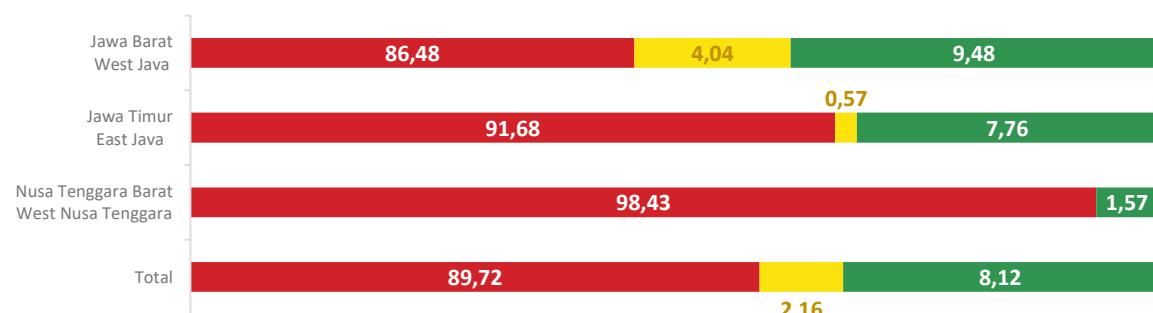
Sub-indikator ini mengukur dan mengklasifikasikan lahan pertanian berdasarkan jarak produktivitasnya dari persentil ke-90 distribusi nilai produksi per hektar. Dari penghitungan yang telah dilakukan terhadap tiga Provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, didapatkan hasil sebagai berikut.

This sub-indicator measures and classifies agricultural land based on the distance of its productivity from the 90th percentile of the distribution of production values per hectare. From the calculations that have been carried out on three provinces in Indonesia: West Java, East Java and West Nusa Tenggara, the following results are obtained.



Berdasarkan Nilai produksi per hektar, masih terdapat **89,72 persen** lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang dikategorikan sebagai **lahan pertanian Tidak BerkelaJutan** sedangkan **10,28 persen** lahan pertanian sudah dapat disebut sebagai **lahan pertanian BerkelaJutan**.

Based on the production value per hectare, there are still **89.72 percent** of agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara which are categorized as **unsustainable agricultural land** while **10.28 percent** of agricultural land can be considered as **sustainable agricultural land**.



Jika dikategorikan menurut provinsi, Jawa Barat meraih capaian tertinggi untuk lahan pertanian berkelanjutan berdasarkan nilai produksi per hektar yakni sebesar 13,52 persen. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat hanya terdapat 1,57 persen lahan pertanian yang dianggap sebagai lahan berkelanjutan.

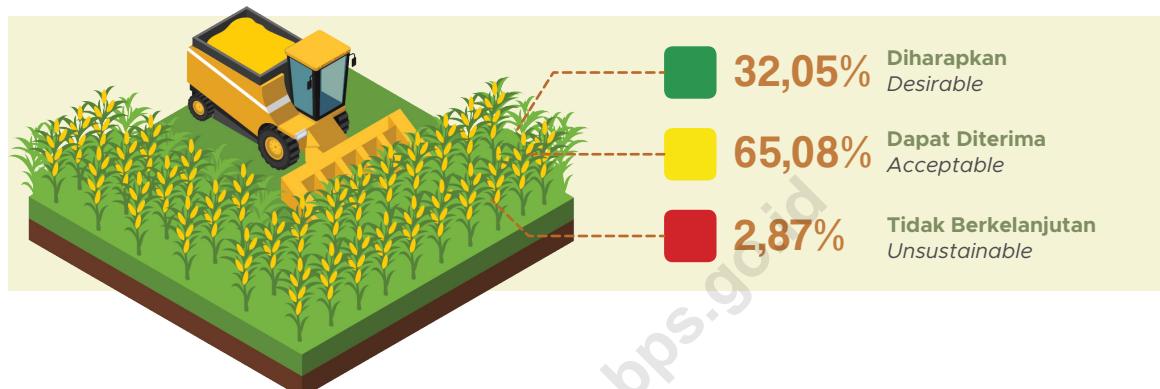
If categorized by province, West Java achieved the highest achievement for sustainable agricultural land based on the production value per hectare, which was 13.52 percent. Meanwhile, in West Nusa Tenggara, only 1.57 percent of agricultural land is considered sustainable.

SUB-  
INDIKATOR 2: 

Pendapatan Bersih Petani  
Net Farm Income

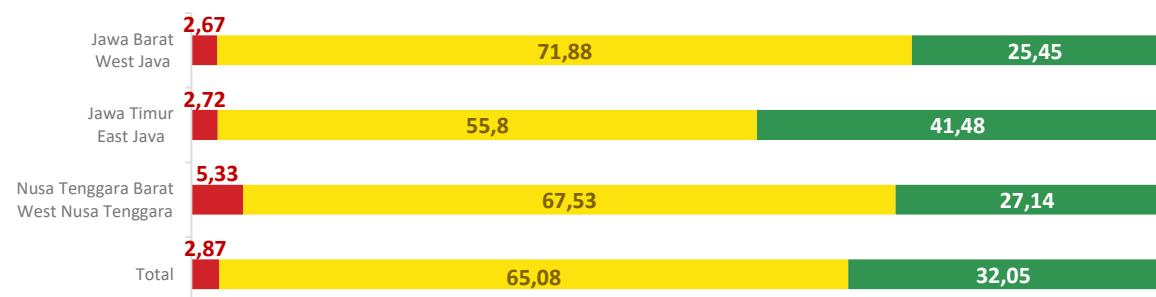
Sub-indikator ini ingin mengetahui apakah unit usaha pertanian mendapatkan keuntungan selama tiga tahun terakhir. Dari penghitungan yang telah dilakukan terhadap tiga Provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, didapatkan hasil sebagai berikut.

*This sub-indicator wants to know whether the agricultural business unit has benefited during the last three years. From the calculations that have been carried out on three provinces in Indonesia, namely West Java, East Java and West Nusa Tenggara, the following results are obtained.*



Berdasarkan gambar diatas, apabila diamati pada sub-indikator Pendapatan bersih petani maka terdapat sebanyak **97,13 persen** lahan pertanian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai **lahan BerkelaJutan** dengan 32,05 persen berkategori Diharapkan dan 65,08 persen berkategori Dapat Diterima, sedangkan selebihnya yaitu sebesar **2,87 persen** lahan pertanian dikategorikan sebagai **lahan pertanian Tidak BerkelaJutan**.

*Based on figure, when observed in the sub-indicator of farmer net income, **97.13 percent** of agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara is categorized as **Sustainable land** with 32.05 percent desirable and 65.08 percent it is categorized as Acceptable, while the rest of **2.87 percent** of agricultural land is categorized as **Unsustainable agricultural land**.*



Dari ketiga provinsi, Jawa Barat memiliki proporsi lahan berkelanjutan tertinggi menurut pendapatan bersih petani yakni sebanyak 97,33 persen dari keseluruhan lahan pertanian. Sementara Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat masing-masing memiliki sebanyak 97,28 dan 94,67 persen lahan pertanian berkelanjutan.

*Of the three provinces, West Java has the highest proportion of sustainable land according to farmers' net income, which is 97.33 percent of the total agricultural land. Meanwhile, East Java and West Nusa Tenggara have 97.28 and 94.67 percent of sustainable agricultural land, respectively.*



SUB-  
INDIKATOR 3:  Mekanisme Mitigasi Risiko  
*Risk Mitigation Mechanisms*

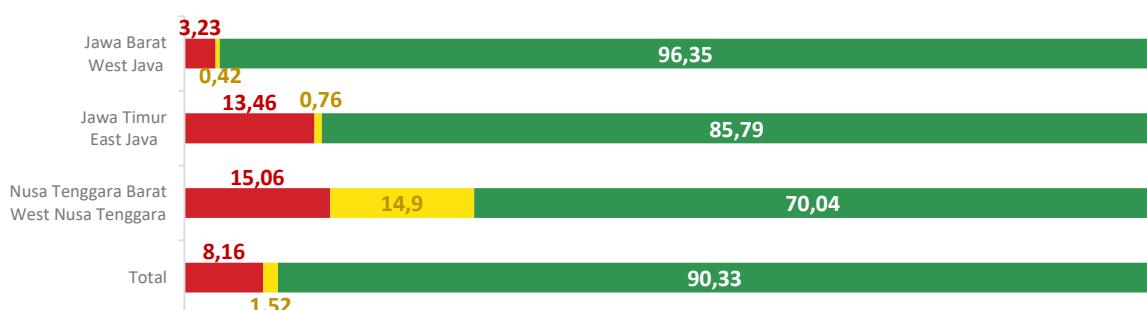
Sub-indikator 3 mengukur pelaksanaan mekanisme mitigasi terhadap risiko yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pertanian. Suatu usaha pertanian dianggap tangguh jika telah tersedia atau memiliki sarana untuk mengakses mekanisme mitigasi risiko.

*Sub-indicator 3 measures the implementation of mitigation mechanisms against risks that arise in the implementation of agricultural activities. A farm holding is considered resilient if it has availed or has the means to access the risk mitigation mechanisms.*



Menurut sub-indikator Mekanisme Mitigasi Risiko maka terdapat hanya **8,16 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang **Tidak Berkelanjutan** sedangkan sebanyak **91,85 persen** dikategorikan sebagai **Berkelanjutan** (masing-masing kategori Diharapkan 90,33 persen dan dapat diterima 1,52 persen).

*According to the Risk Mitigation Mechanism sub-indicator, only **8.16 percent** of agricultural land in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is **unsustainable** while **91.85 percent** is categorized as **Sustainable** (each category Desirable 90.33 percent and acceptable 1.52 percent).*



Jika diamati menurut provinsi, di Nusa Tenggara Barat masih terdapat sebanyak 15,06 persen lahan pertanian yang tidak berkelanjutan. Tidak berbeda jauh dengan Jawa Timur dimana masih terdapat 13,46 persen lahan pertanian yang tidak berkelanjutan. Sedangkan 96,77 persen lahan pertanian di Jawa Barat sudah dikategorikan sebagai lahan pertanian berkelanjutan.

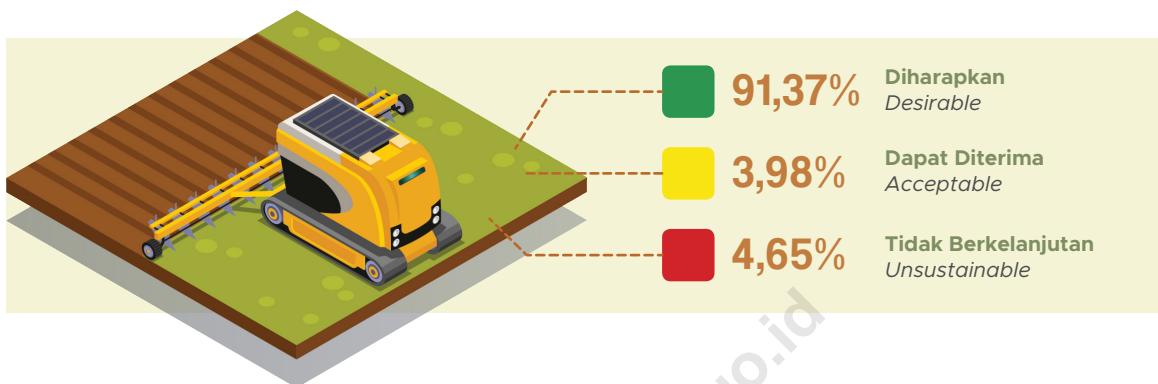
*If observed by province, in West Nusa Tenggara there is still as much as 15.06 percent of unsustainable agricultural land. Not much different from East Java where there are still 13.46 percent of unsustainable agricultural land. Meanwhile, 96.77 percent of agricultural land in West Java is categorized as sustainable agricultural land.*

SUB-  
INDIKATOR 4: 

**Prevalensi Degradasi Tanah**  
*Prevalance of Soil Degradation*

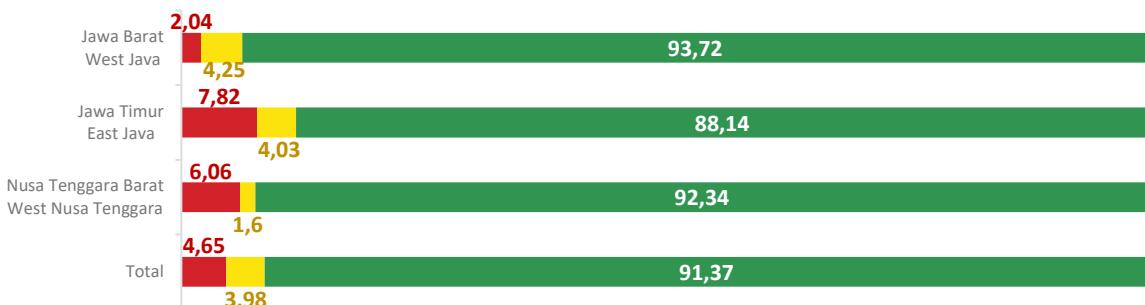
Sub-indikator ini mengukur sejauh mana kegiatan pertanian mempengaruhi kesehatan tanah dan hal tersebut merupakan masalah keberlanjutan.

*This sub-indicator measures the extent to which agricultural activities affect soil health and this is a matter of sustainability.*



Dilihat dari sub-indikator Prevalensi degradasi tanah, sebanyak **95,35 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai lahan **Berkelaanjutan** yang terdiri dari 91,37 persen berkategori Diharapkan dan 3,98 persen berkategori Dapat Diterima, sedangkan sisanya yaitu sebesar **4,65 persen** lahan pertanian dikategorikan sebagai lahan pertanian **Tidak Berkelaanjutan** akibat praktik pengelolaan lahan yang kurang tepat.

According to the Prevalence of land degradation, **95.35 percent** of agricultural land in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is categorized as **Sustainable** land, consisting of 91.37 percent for the Desirable category and 3.98 percent for the Acceptable category, while the remaining **4.65 percent** of agricultural land is categorized as land that is managed with practices that result in **unsustainable** agriculture due to inappropriate land management practices.



Pada level provinsi, capaian tertinggi untuk lahan pertanian berkelanjutan menurut prevalensi degradasi tanah adalah Jawa Barat yakni sebanyak 97,96 persen dari total lahan pertanian. Sedangkan 2 provinsi lainnya yakni Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat masih memiliki lebih dari 5 persen lahan pertanian yang tidak berkelanjutan.

At the provincial level, the highest achievement for sustainable agricultural land according to the prevalence of land degradation is West Java, which is 97.96 percent of the total agricultural land. Meanwhile, the other 2 provinces: East Java and West Nusa Tenggara, still have more than 5 percent of unsustainable agricultural land.

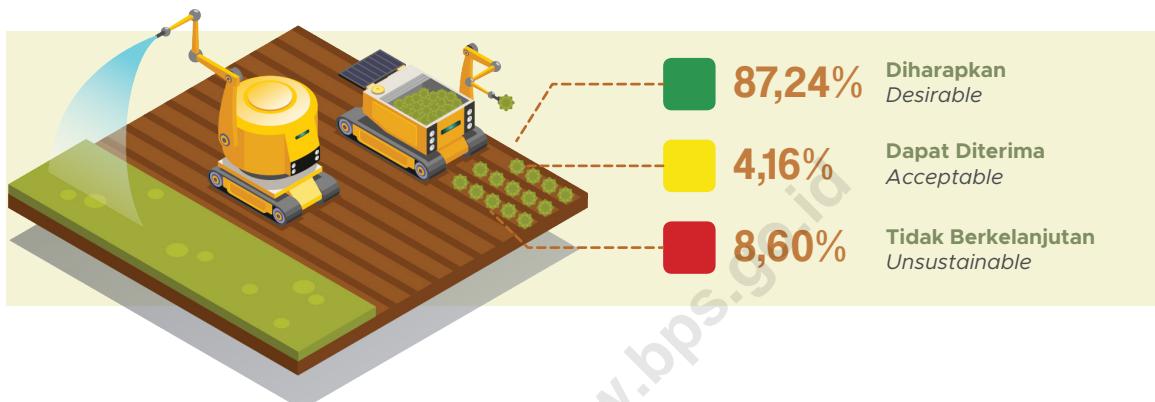
SUB-  
INDIKATOR 5:



Kondisi Ketersediaan Air  
Variation in Water Availability

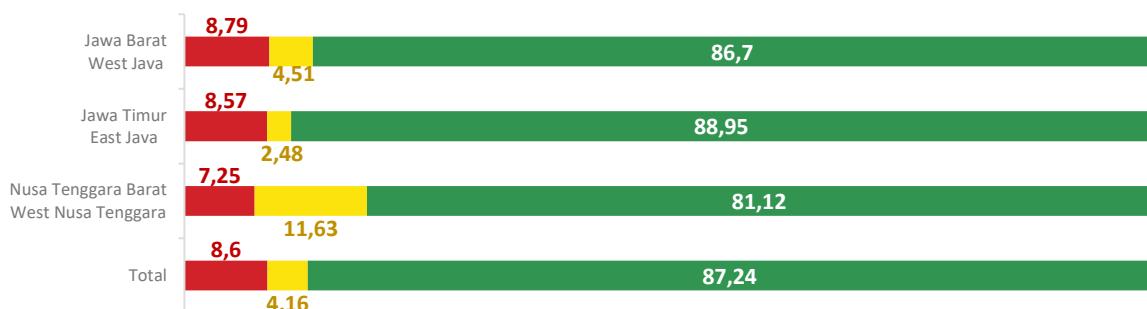
Sub-indikator ini ingin menangkap sejauh mana kontribusi pertanian terhadap pola penggunaan air yang tidak berkelanjutan. Idealnya, tingkat ketidakberlanjutan dalam penggunaan air diukur pada skala wilayah sungai atau akuifer air tanah, karena ini adalah efek gabungan dari semua pengguna yang berbagi sumber daya yang sama yang berdampak pada kelestarian air.

*This sub-indicator captures the extent to which agriculture contributes to unsustainable patterns of water use. Ideally the level of unsustainability in water use is measured at the scale of the river basin or groundwater aquifer, as it is the combined effect of all users sharing the same resource that impacts water sustainability.*



Untuk sub-indikator Kondisi ketersediaan air, sebesar **91,40 persen** lahan pertanian di 3 Provinsi dikategorikan sebagai lahan **Berkelanjutan** yang terdiri dari 87,24 persen berkategori Diharapkan dan 4,16 persen berkategori Dapat Diterima, sedangkan sisanya yaitu sebesar **8,60 persen** lahan pertanian dikategorikan sebagai lahan pertanian **Tidak Berkelaanjutan**.

*For the sub-indicator of water availability conditions, **91.40 percent** of agricultural land in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is categorized as **Sustainable** land, consisting of 87.24 percent for the Desirable category and 4.16 percent for the Acceptable category, while the rest that is, **8.60 percent** of agricultural land is categorized as **unsustainable** agricultural land.*



Dibandingkan Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur merupakan provinsi dimana terdapat ketersediaan air yang stabil selama bertahun-tahun dan mampu mengairi lebih dari 10 persen lahan pertanian yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan capaian lahan pertanian pada kategori diharapkan sebesar 88,95 persen.

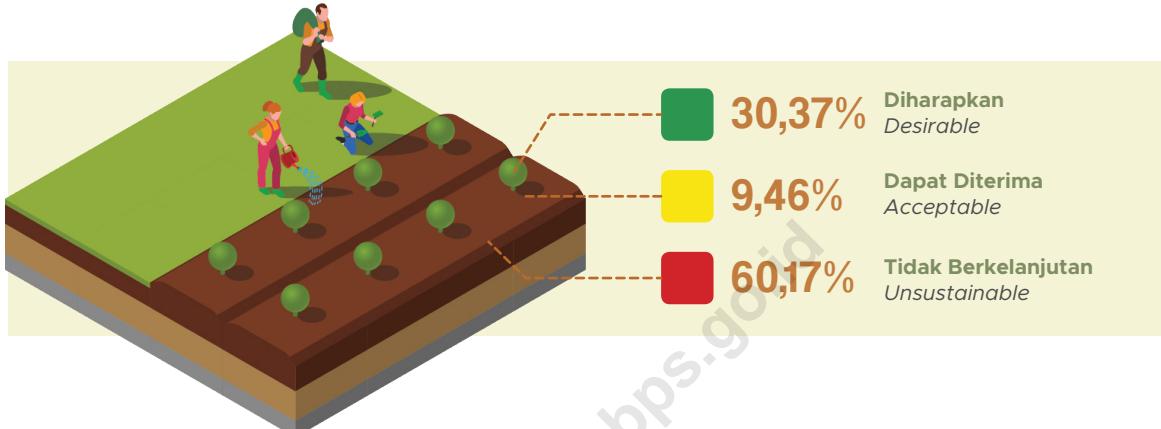
*Compared to West Java and West Nusa Tenggara, East Java is a province where there is stable water availability for years and is able to irrigate more than 10 percent of the existing agricultural land. This is indicated by the achievement of desirable agricultural land of 88.95 percent.*

**SUB-  
INDIKATOR 6:** 

## Manajemen Penggunaan Pupuk Management of fertilizers

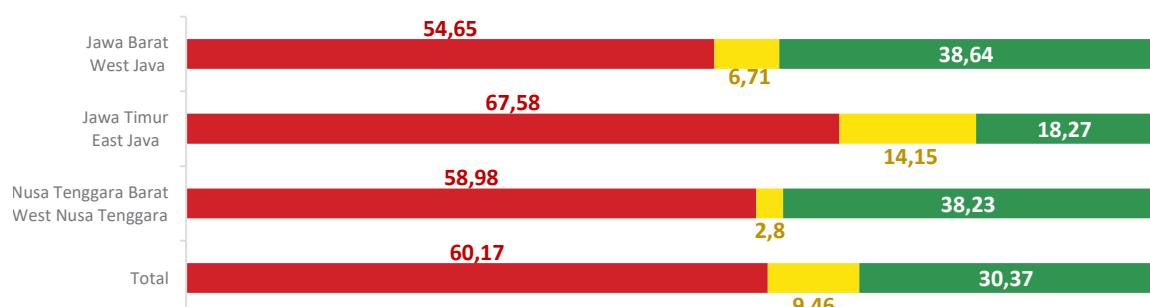
Sub-indikator ini mengukur manajemen penggunaan pupuk dengan pendekatan informasi penggunaan pupuk oleh petani, kesadaran mereka terhadap risiko lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk, serta perilaku mereka dalam mengelola pupuk dan kotoran.

*This sub-indicator measures the management of fertilizer use with an information approach to the use of fertilizers by farmers, their awareness of environmental risks arising from fertilizer use, and their behavior in managing fertilizers and manure.*



Menurut Sub-indikator Manajemen penggunaan pupuk maka sebesar **60,17 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai lahan pertanian **Tidak Berkelaanjutan**, sedangkan sisanya yaitu sebesar **39,83 persen** dikategorikan sebagai lahan pertanian yang **Berkelaanjutan** (terdiri dari 30,37 persen kategori Diharapkan dan 9,46 persen kategori Dapat diterima).

*According to the Management Sub-indicator of fertilizer use, **60.17 percent** of agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara is categorized as **unsustainable** agricultural land, while the remaining **39.83 percent** is categorized as **Sustainable** agricultural land (consisting of 30.37 percent for the Desirable category and 9.46 percent for the Acceptable category).*



Di Jawa Timur terdapat 67,58 persen lahan pertanian dimana petani menggunakan pupuk tetapi tidak ada satupun ukuran spesifik mitigasi risiko penggunaan pupuk yang diperhatikan, sehingga dikategorikan sebagai lahan pertanian tidak berkelanjutan. Hal yang serupa juga ditemukan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dimana masing-masing terdapat 54,65 persen dan 58,98 persen lahan pertanian tidak berkelanjutan.

*In East Java, there are 67.58 percent of agricultural land where farmers use fertilizers but none of the specific measures to mitigate the risk of using fertilizer are considered, so it is categorized as unsustainable agricultural land. Similar things are also found in West Java and West Nusa Tenggara where 54.65 percent and 58.98 percent of agricultural land are not sustainable, respectively.*



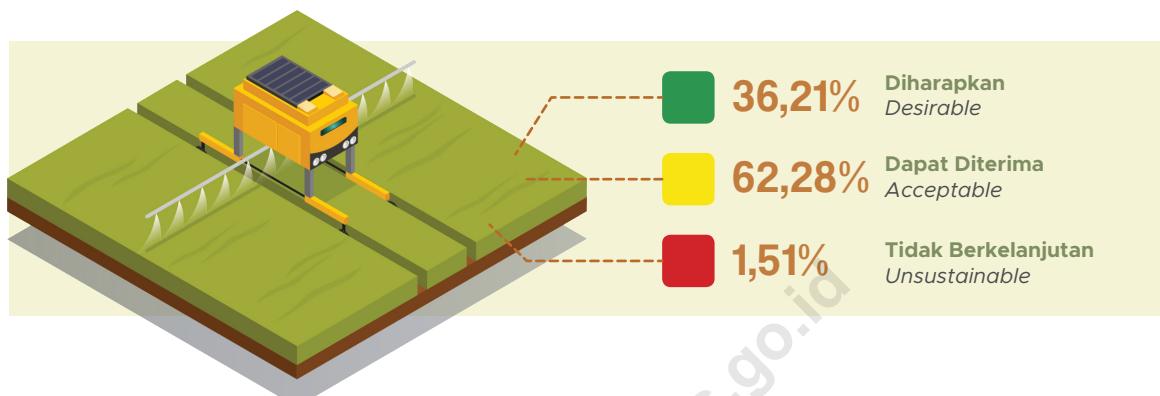
SUB-  
INDIKATOR 7:



Manajemen Penggunaan Pestisida  
Management of Pesticides

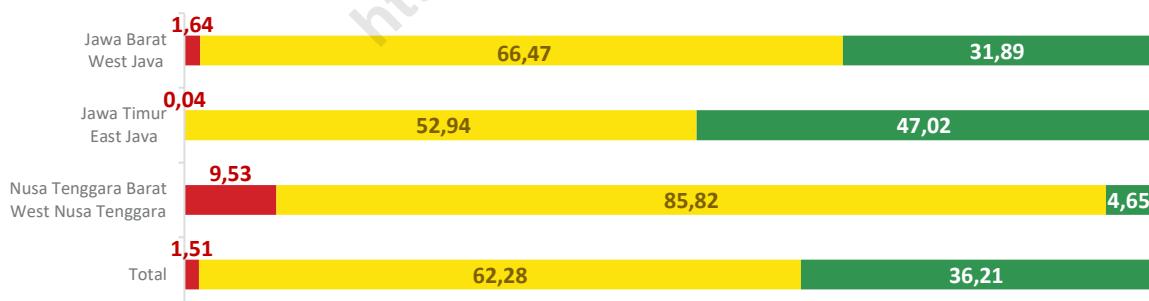
Penghitungan sub-indikator didasarkan dari informasi tentang penggunaan pestisida di pertanian, jenis pestisida yang digunakan, dan jenis tindakan yang diambil untuk memitigasi risiko terkait.

The sub-indicator calculation is based on information about the use of pesticides in agriculture, the types of pesticides used, and the types of actions taken to mitigate the associated risks.



Berdasarkan Manajemen penggunaan pestisida, terdapat sebanyak **98,49 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai lahan **Berkelaanjutan**, terdiri dari kategori Diharapkan sebesar 36,21 persen dan Dapat diterima sebesar 62,28 persen, dan hanya terdapat sebanyak **1,51 persen** lahan pertanian merupakan lahan pertanian **Tidak Berkelaanjutan**.

Based on the management of pesticide use, there are as many as **98.49 percent** of agricultural land in West Java, East Java, and East Nusa Tenggara that are categorized as **Sustainable** land, consisting of the Desirable category of 36.21 percent and Acceptable of 62.28 percent, and only as much as **1.51 percent** of agricultural land is **Unsustainable** agricultural land.



Pada tingkat provinsi, di Nusa Tenggara Barat masih terdapat hampir 10 persen lahan pertanian tidak berkelanjutan menurut manajemen penggunaan pestisida. Hal ini menggambarkan bahwa di wilayah tersebut masih ditemukan petani yang menggunakan pestisida yang berbahaya atau sangat berbahaya dan atau ilegal tanpa mengambil langkah-langkah khusus terkait kesehatan lingkungan. Sementara itu, 2 provinsi lainnya yakni Jawa Barat dan Jawa Timur hanya terdapat kurang dari 2 persen lahan pertanian yang tidak berkelanjutan dalam hal manajemen penggunaan pestisida.

At the provincial level, in West Nusa Tenggara there is still nearly 10 percent of agricultural land unsustainable according to pesticide use management. This illustrates that in these areas there are still farmers who use pesticides that are dangerous or very dangerous and / or illegal without taking special steps related to environmental health. Meanwhile, the 2 other provinces: West Java and East Java, only contain less than 2 percent of unsustainable agricultural land in terms of pesticide use management.

**SUB-  
INDIKATOR 8:** 

**Praktik dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro**  
*Use Of Agro-Biodiversity-Supportive Practices*

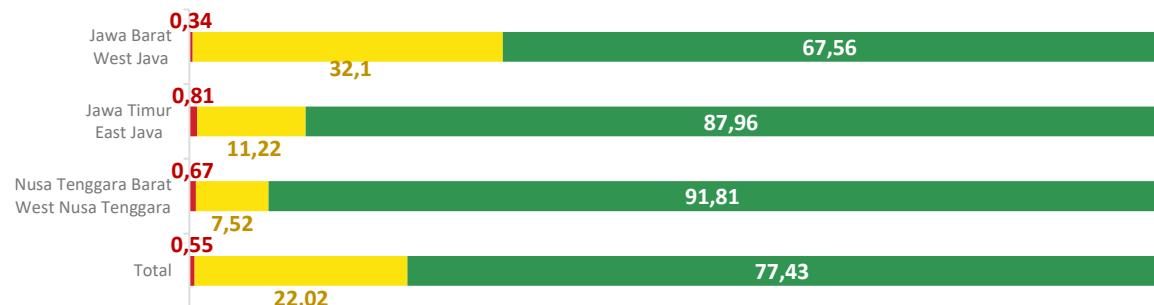
Sub-indikator ini mengukur adopsi praktik bantuan keanekaragaman hayati oleh petani pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik.

*This sub-indicator measures the adoption of biodiversity assisted practices by farmers at the ecosystem, species and genetic levels.*



Menurut Praktik penggunaan bantuan keanekaragaman hayati berbasis agro, sebesar **99,45 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai lahan pertanian yang **BerkelaJutan**, terdiri dari kategori Diharapkan sebesar 77,43 persen dan Dapat diterima sebesar 22,02 persen, sedangkan sisanya yaitu sebesar **0,55 persen** dikategorikan sebagai lahan pertanian **Tidak BerkelaJutan**.

According to the practice of using agro-based biodiversity assistance, **99.45 percent** of agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara is categorized as **Sustainable** agricultural land, consisting of the Desirable category of 77.43 percent and Acceptable of 22.02. percent, while the remaining **0.55 percent** is categorized as **unsustainable** agricultural land.



Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Nusa Tenggara Barat hanya memiliki kurang dari 1 persen lahan pertanian tidak berkelanjutan menurut Praktik dukungan penggunaan keanekaragaman hayati berbasis agro. Dengan kata lain, terdapat kurang dari 1 persen lahan pertanian dimana petani tidak menerapkan satupun kriteria keberlanjutan pertanian organik maupun non-organik yang telah ditetapkan.

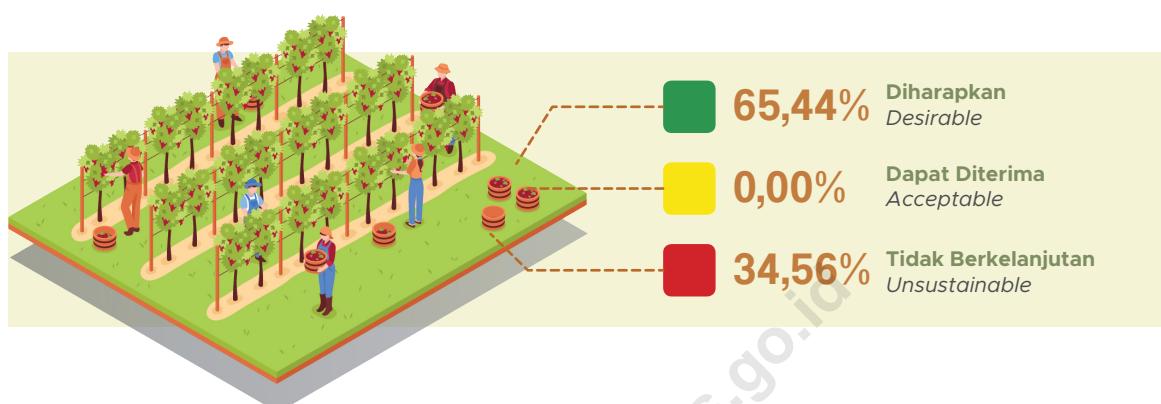
*West Java, East Java, and West Nusa Tenggara only have less than 1 percent of unsustainable agricultural land according to agro-biodiversity-supportive practices. In other words, there is less than 1 percent of agricultural land where farmers do not apply any of the sustainability criteria for organic or non-organic agriculture that have been determined.*

SUB-  
INDIKATOR 9: 

Besaran Upah di Pertanian  
Wage Rate in Agriculture

Sub-indikator ini mengukur tingkat upah harian dari pekerja tidak terampil dalam satuan mata uang lokal.

This sub-indicator measures the daily wage rate of unskilled workers in local currency.



Menurut Besaran upah di pertanian maka sebesar **65,44 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai lahan pertanian yang **Berkelanjutan**, sedangkan sisanya yaitu sebesar **34,56 persen** dikategorikan sebagai lahan pertanian yang **Tidak Berkelanjutan**.

According to the wages in agriculture, **65.44 percent** of agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara is categorized as **Sustainable** agricultural land, while the remaining **34.56 percent** is categorized as **unsustainable** agricultural land.



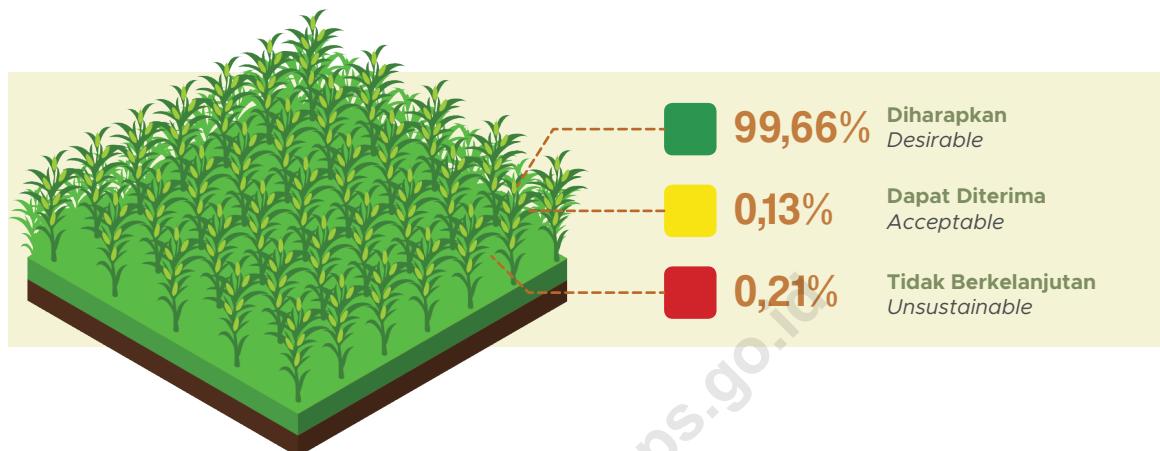
Di Nusa Tenggara Barat, terdapat lebih dari 60 persen lahan pertanian tidak berkelanjutan dimana rata-rata upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak terlatih (pekerja lepas) lebih kecil dari upah minimum nasional atau upah minimum pekerja sektor pertanian. Sementara itu di Jawa Barat, hanya terdapat kurang dari 30 persen lahan pertanian tidak berkelanjutan menurut besaran upah pekerja.

In West Nusa Tenggara, there is more than 60 percent of unsustainable agricultural land where the average wage paid to unskilled workers is less than the national minimum wage or the minimum wage for agricultural sector workers. Meanwhile in West Java, there is only less than 30 percent of agricultural land unsustainable according to the wages of workers.

## SUB- INDIKATOR 10: Food Insecurity Experience Index (FIES)

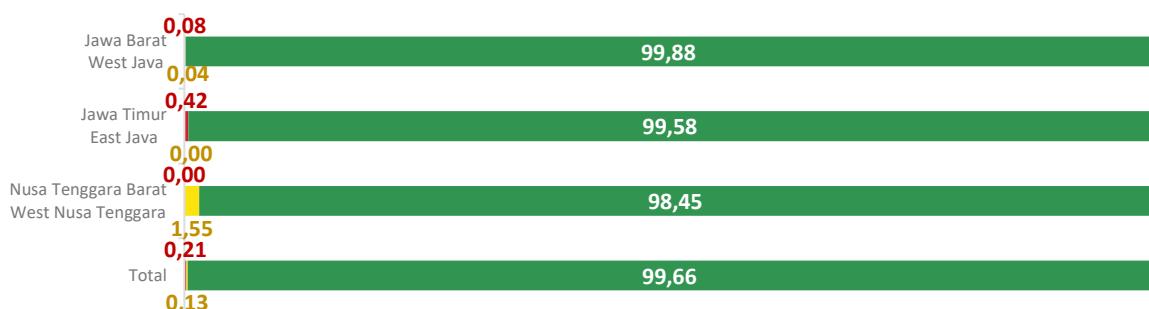
Sub-indikator 10 merupakan ukuran keparahan dari kerawanan pangan yang dialami oleh individu maupun rumah tangga.

*Sub-indicator 10 is a measure of the severity of food insecurity experienced by individuals and households.*



Menurut FIES maka sebesar **99,79 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai lahan pertanian yang **Berkelaanjutan**, terdiri dari kategori Diharapkan sebanyak 99,66 persen dan Dapat diterima sebesar 0,13 persen, sedangkan sisanya yaitu sebesar **0,21 persen** dikategorikan sebagai lahan pertanian **Tidak Berkelaanjutan**.

*According to FIES, **99.79 percent** of agricultural land in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is categorized as **Sustainable** agricultural land, consisting of 99.66 percent desirable and 0.13 percent acceptable, while the rest is **0.21 percent** are categorized as **Unsustainable** agricultural land.*



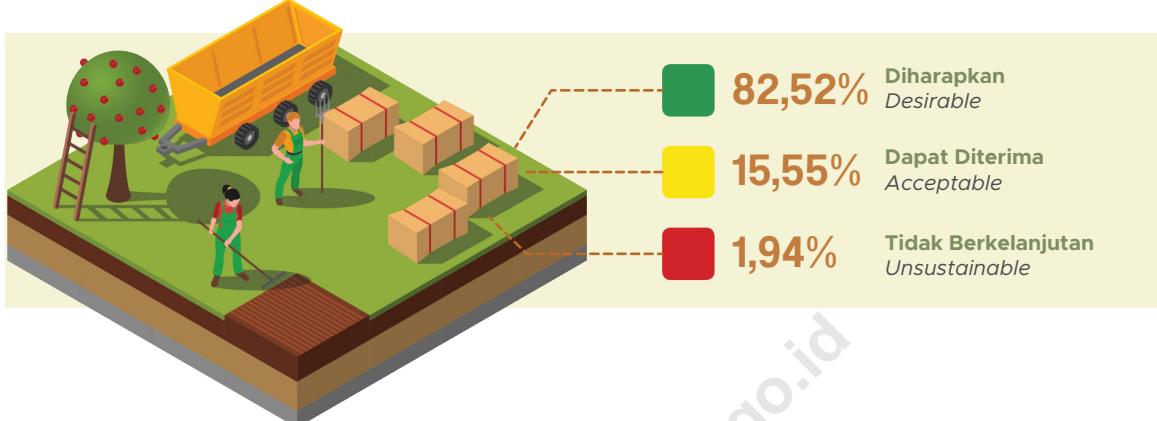
Pada tingkat provinsi, di Nusa Tenggara Barat tidak terdapat unit usaha pertanian yang berpeluang untuk mengalami kerawanan pangan pada level parah. Di Jawa Barat dan Jawa Timur pun hanya terdapat kurang dari 1 persen lahan pertanian tidak berkelaanjutan dimana petani berpeluang untuk mengalami kerawanan pangan pada level parah.

*At the provincial level, West Nusa Tenggara does not have an agricultural holding with the potential for severe food insecurity. Even in West and East Java, there is less than 1 percent of unsustainable agricultural land where farmers are experiencing severe food insecurity.*

SUB-  
INDIKATOR 11:  **Hak Kepemilikan Lahan**  
*Secure Tenure Rights to Land*

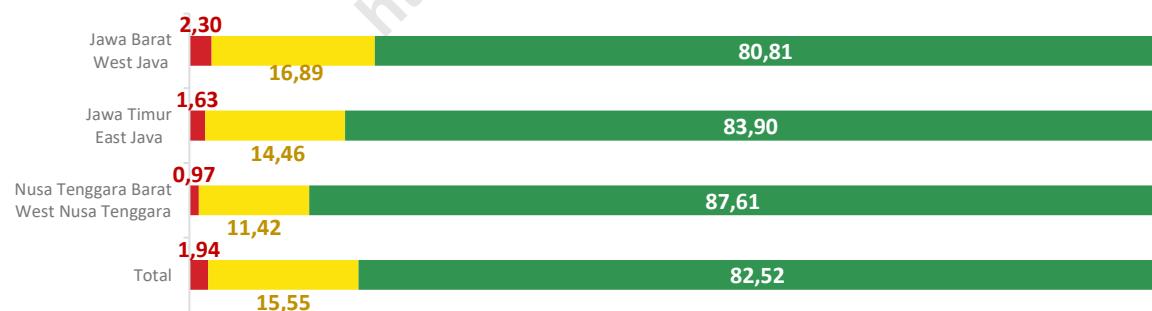
Sub-indikator 11 mengukur kepemilikan atau hak atas penggunaan lahan pertanian.

Sub-indicator 11 measures ownership or rights to use agricultural land.



Menurut Hak kepemilikan lahan, sebesar **98,07 persen** lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat merupakan lahan pertanian **Berkelaanjutan**, terdiri dari 82,52 persen Diharapkan dan 15,55 persen Dapat diterima, sedangkan sisanya yaitu sebesar **1,94 persen** merupakan lahan pertanian yang **Tidak Berkelaanjutan**.

According to land ownership rights, **98.07 percent** of agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara is **Sustainable** agricultural land, consisting of 82.52 percent Desirable and 15.55 percent Acceptable, while the rest is **1.94 percent** is **unsustainable** agricultural land.

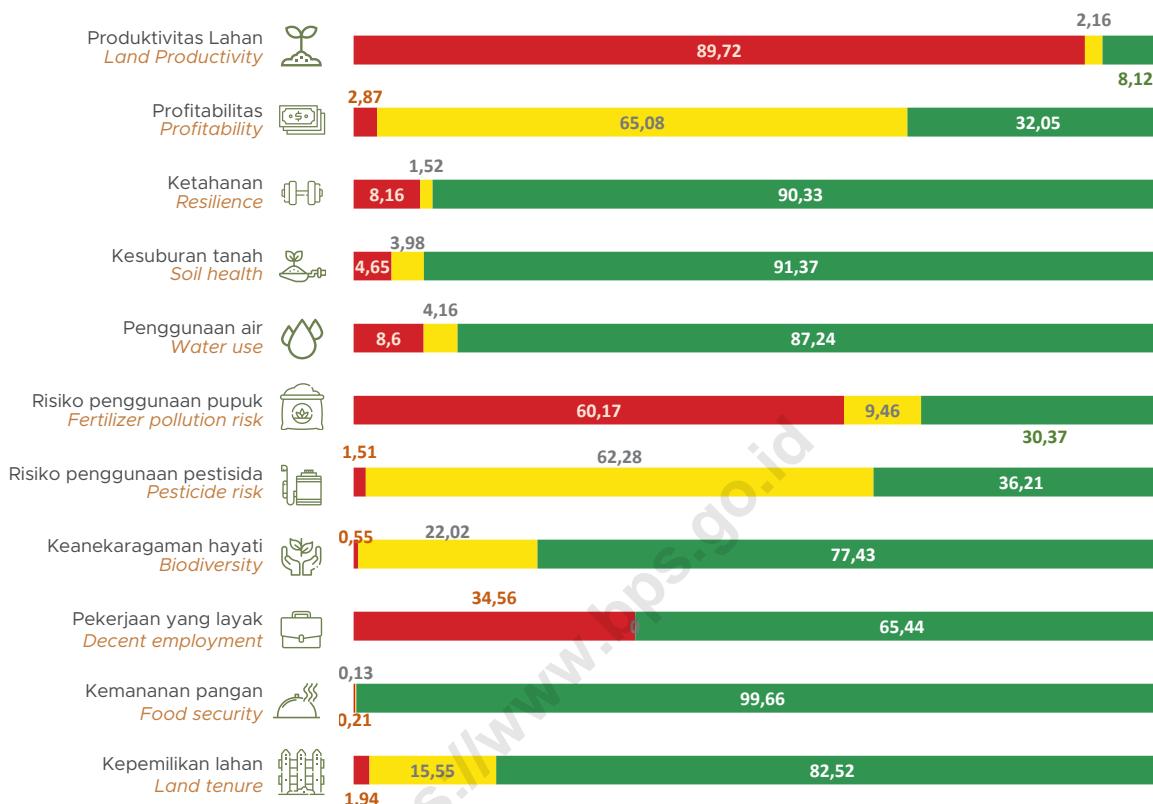


Di antara ketiga provinsi, Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah dengan persentase lahan pertanian dengan kategori diharapkan tertinggi menurut hak kepemilikan lahan, yakni sebesar 87,61 persen. Artinya, terdapat 87,61 persen lahan pertanian dimana petani telah memiliki dokumen resmi kepemilikan lahan, atau mempunyai hak untuk menjual dan mewariskan.

Among the three provinces, West Nusa Tenggara is the region with the highest percentage of desirable agricultural land according to land ownership rights, at 87.61 percent. This implies that there are 87.61 percent of agricultural land where farmers already have formal documents of land ownership, or have the right to sell and bequeath.

## Kesimpulan

### Conclusion



Berdasarkan grafik diatas, persentase tertinggi lahan pertanian Tidak Berkelaanjutan adalah sebesar 89,72 persen pada Sub-indikator Produktivitas Lahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

Based on the graph above, the highest percentage of unsustainable agricultural land is 89.72 percent in the Land Productivity Sub-indicator. Thus, it can be concluded that:

sebesar **89,72%**  
penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dikategorikan sebagai **dibawah standar** pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan

as much as **89,72%**  
of agricultural land use in West Java, East Java, and West Nusa Tenggara is categorized as **under productive management standards** that ensure sustainable agriculture

Sedangkan, hanya sekitar  
**10,28%**  
lahan pertanian di  
ketiga provinsi tersebut  
yang telah **memenuhi standar**  
pengelolaan produktif sebagai lahan  
pertanian yang berkelanjutan

Meanwhile, only about  
**10,28%**  
of agricultural land in the three provinces  
**has met the standards**  
for productive management as  
sustainable agricultural land

# Target 5.a

## Target 5.a

“

*Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional*

*Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws*

“

### Indikator TPB 5.a.1

#### SDGs Indicator 5.a.1

Indikator 5.a.1 secara umum bertujuan untuk mengukur prevalensi kepemilikan atau hak atas lahan pertanian pada rumah tangga pertanian. Sumber data yang digunakan dalam penghitungan ini merupakan hasil Survei Pertanian Terintegrasi 2020 (SITASI2020) yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November di tiga provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Penghitungan indikator 5.a.1 diambil dari rincian pada Kuesioner KOR dan Modul Mesin, Peralatan, dan Aset SITASI2020. Disagregasi pada level wilayah, yaitu provinsi dan rata-rata dari tiga provinsi terpilih akan tersedia pada laporan ini. Selain itu, disagregasi berdasarkan jenis kelamin juga disusun untuk menyediakan keterbandingan pada level internasional.

*Indicator 5.a.1 aims to measure prevalence of ownership or tenure right over agricultural land in the reference of population (agricultural households). Indonesian first integrated agricultural pilot survey, known as SITASI2020, used as data source of measuring Indicator 5.a.1. This survey was conducted in three provinces West Java, East Java, and West Nusa Tenggara in October-November 2020.*

*Items from Core Module and Machinery, Equipment and Asset Module were taken to measure SDGs 5.a.1. The figure disaggregated at provincial level and the average of three selected provinces. Then, disaggregation by sex is provided as it is being mandatory figure for international level.*



## Metodologi

### Methodology

Indikator 5.a.1 dihitung melalui konsep **“Hak yang terjamin atas lahan pertanian”**. Dalam hal ini, hak yang terjamin diukur menggunakan tiga variabel proksi yaitu:

*Indicator 5.a.1 used a concept of **“Secure ownership or secure tenure right over agricultural land”**. For measuring this indicator, three proxy variables are used:*



**Kepemilikan atas dokumen yang sah**  
*The possession of legal documents*



**Adanya hak untuk menjual lahan pertanian**  
*The right to sell*



**Adanya hak untuk mewariskan lahan pertanian**  
*The right to bequeath*

Apabila **satu dari ketiga kriteria sudah terpenuhi**, maka pemilik atau pengelola dikategorikan memiliki hak yang aman atas lahan.

*If an agricultural household fulfilled one of three criteria, the household could be categorized as having secure tenure rights.*

Indikator 5.a.1 dibagi menjadi empat indikator yaitu 5.a.1.(a), 5.a.1.(a) perempuan, 5.a.1.(a) laki-laki dan 5.a.1 (b). Penyusunan indikator mengacu pada rumus berikut :

*SDGs 5.a.1 divided into four sub-indicators: 5.a.1.(a), 5.a.1.(a) woman, 5.a.1.(a) man and 5.a.1 (b).  
Indicator 5.a.1 calculated using formula below:*

**SDG**

**5.a.1.(a) =**

Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian  
*adults with secure agricultural land rights*

—————  
Total penduduk pada sektor pertanian  
*adults in agricultural population (in ag HHs)*

**SDG**

**5.a.1.a(p) =**

Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian  
*women with secure agricultural land rights*

—————  
Total penduduk perempuan pada sektor pertanian  
*women in agricultural population (in ag HHs)*

**SDG**

**5.a.1.a(l) =**

Total penduduk laki-laki yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian  
*men with secure agricultural land rights*

—————  
Total penduduk laki-laki pada sektor pertanian  
*men in agricultural population (in agr HHs)*

**SDG**

**5.a.1.(b) =**

Total penduduk perempuan yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian  
*women with secure agriculture land rights*

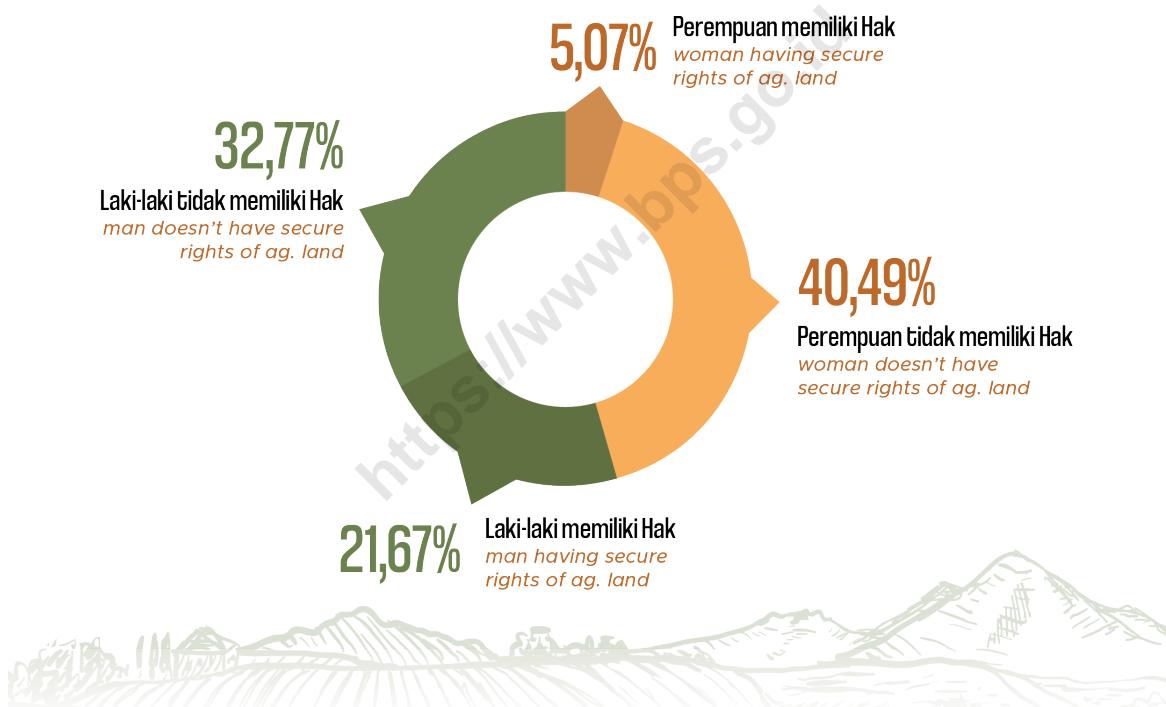
—————  
Total penduduk yang memiliki hak yang aman atas lahan pertanian  
*adults with secure agriculture land rights by type of tenure*

## Hasil

### Result

Berdasarkan hasil SITASI2020 dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar atas kepemilikan lahan yang terjamin pada laki-laki dan perempuan. Grafik di bawah menunjukkan bahwa terdapat 21,67 persen laki-laki dan 5,07 persen perempuan yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, terdapat 32,77 persen laki-laki dan 40,49 persen perempuan yang tidak memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian di ketiga provinsi tersebut.

Based on the result of SITASI2020, there is a gap of land ownership between men and women. The graph below shows that there are 21,67 percent men and 5,07 percent women who have secure rights to agricultural land in West Java, East Java and West Nusa Tenggara. Furthermore, there are 32,77 percent men and 40,49 percent women who do not have secure rights to agricultural land in these three provinces.

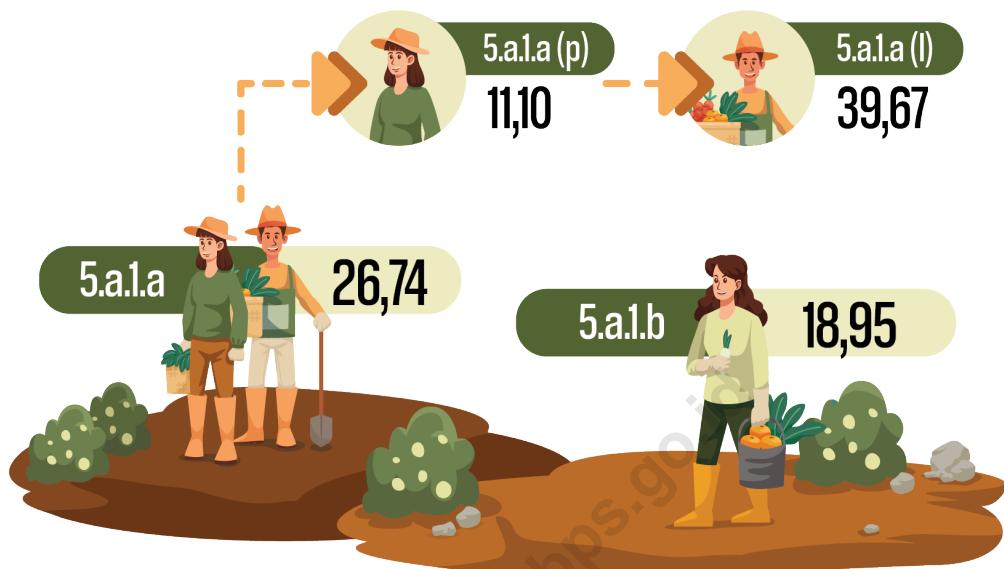


Berdasarkan hasil uji coba di tiga provinsi data dilihat bahwa secara rata-rata dari seratus penduduk perempuan dewasa di sektor pertanian, terdapat 10-11 perempuan dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian (Indikator TPB 5.a.1.a untuk perempuan). Sedangkan secara rata-rata dari seratus penduduk dewasa laki-laki di sektor pertanian, terdapat 39-40 laki-laki dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian (Indikator TPB 5.a.1.a untuk laki-laki). Selanjutnya, secara rata-rata dari seratus penduduk dewasa di sektor pertanian, terdapat 18-19 perempuan dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian (Indikator TPB 5.a.1.b).

Based on the results of trials in three provinces, the data shows that on average, out of a hundred adult women in the agricultural sector, there are 10-11 adult women who have secure rights to agricultural land (SDGs indicator 5.a.1.a for women). Meanwhile, on average, out of a hundred adult male population in the agricultural sector, there are 39-40 adult men who have secure rights to agricultural land (SDGs indicator 5.a.1.a for men). Furthermore, on average, out of a hundred adult population in the agricultural sector, there are 18-19 adult women who have secure rights to agricultural land (SDGs indicator 5.a.1.b).

## Indikator TPB 5.a.1 di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat

5.a.1 SDGs Indicator in West Java, East Java and West Nusa Tenggara



Indikator 5.a.1 memungkinkan adanya keterbandingan antar wilayah. Penghitungan indikator 5.a.1.a menunjukkan bahwa dari seratus penduduk usia dewasa di sektor pertanian, terdapat 26-27 penduduk dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian. Apabila dirinci berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa dari seratus penduduk usia dewasa di sektor pertanian, terdapat 27-28 penduduk dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat memiliki indikator 5.a.1.a yang hampir sama yaitu 25,95% dan 25,88%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari seratus penduduk usia dewasa di sektor pertanian terdapat 25-26 penduduk dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian baik di Provinsi Jawa Barat maupun Nusa Tenggara Barat.

Penghitungan indikator 5.a.1.a perempuan menunjukkan bahwa dari seratus penduduk perempuan dewasa di sektor pertanian, terdapat 14-15 perempuan dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 11-12 perempuan dan 7-8 perempuan di Provinsi Jawa Barat.

Penghitungan Indikator 5.a.1.a laki-laki menunjukkan bahwa dari seratus penduduk laki-laki dewasa di sektor pertanian, terdapat 40-41 laki-laki dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur terdapat 39-40 orang.

Penghitungan Indikator 5.a.1.b menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk dewasa di sektor pertanian, terdapat terdapat 24-25 perempuan dewasa yang memiliki hak yang terjamin atas lahan pertanian di Provinsi Jawa Timur disusul Nusa Tenggara Barat sebesar 21-22 perempuan, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 13-14 perempuan.

Ketiga provinsi menunjukkan pola ketimpangan gender yang sama dimana proporsi perempuan yang memiliki lahan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender. Provinsi Jawa Timur memiliki ketimpangan gender yang relatif lebih kecil dibanding provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan adanya pemberdayaan perempuan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur disusul kemudian oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat lalu Jawa Barat.

*Indicator 5.a.1 allows for comparisons between regions. The calculation of SDGs indicator 5.a.1.a in three provinces shows that out of a hundred adult population in the agricultural sector, there are 26-27 persons who have secure rights to agricultural land. By province, out of a hundred adult population in the agricultural sector, there are 27-28 persons who have secure rights to agricultural land in East Java Province. Therefore, West Java province and West Nusa Tenggara province has a similar percentage of 5.a.1.a indicator of 25,95% and 25,88%. It means that out of a hundred adult population in the agricultural sector, there are 25-26 persons who have secure rights to agricultural land in West Java Province and West Nusa Tenggara province.*

*The calculation of female indicator 5.a.1.a shows that out of a hundred adult female population in the agricultural sector, there are 14-15 adult women who have secure rights to agricultural land in East Java Province. Meanwhile in West Nusa Tenggara Province there are 11-12 women and 7-8 women in West Java Province.*

*The calculation of male indicators 5.a.1.a shows that out of a hundred adult male population in the agricultural sector, there are 40-41 adult males who have secure rights to agricultural land in West Nusa Tenggara and West Java Province. Meanwhile, in East Java Province there are 39-40 people.*

*The calculation of indicator 5.a.1.b shows that of the entire adult population in the agricultural sector, there are 24-25 adult women who have secure rights to agricultural land in East Java Province, followed by West Nusa Tenggara with 21-22 women, and Province West Java with 13-14 women.*

*The three provinces show a similar pattern of gender inequality where the proportion of women owning land still needs to be increased to achieve gender equality. The province of East Java has gender inequality that is relatively smaller than that of West Java and West Nusa Tenggara. Meanwhile, the highest level of women's empowerment was in the province of East Java, followed by West Nusa Tenggara and then West Java.*





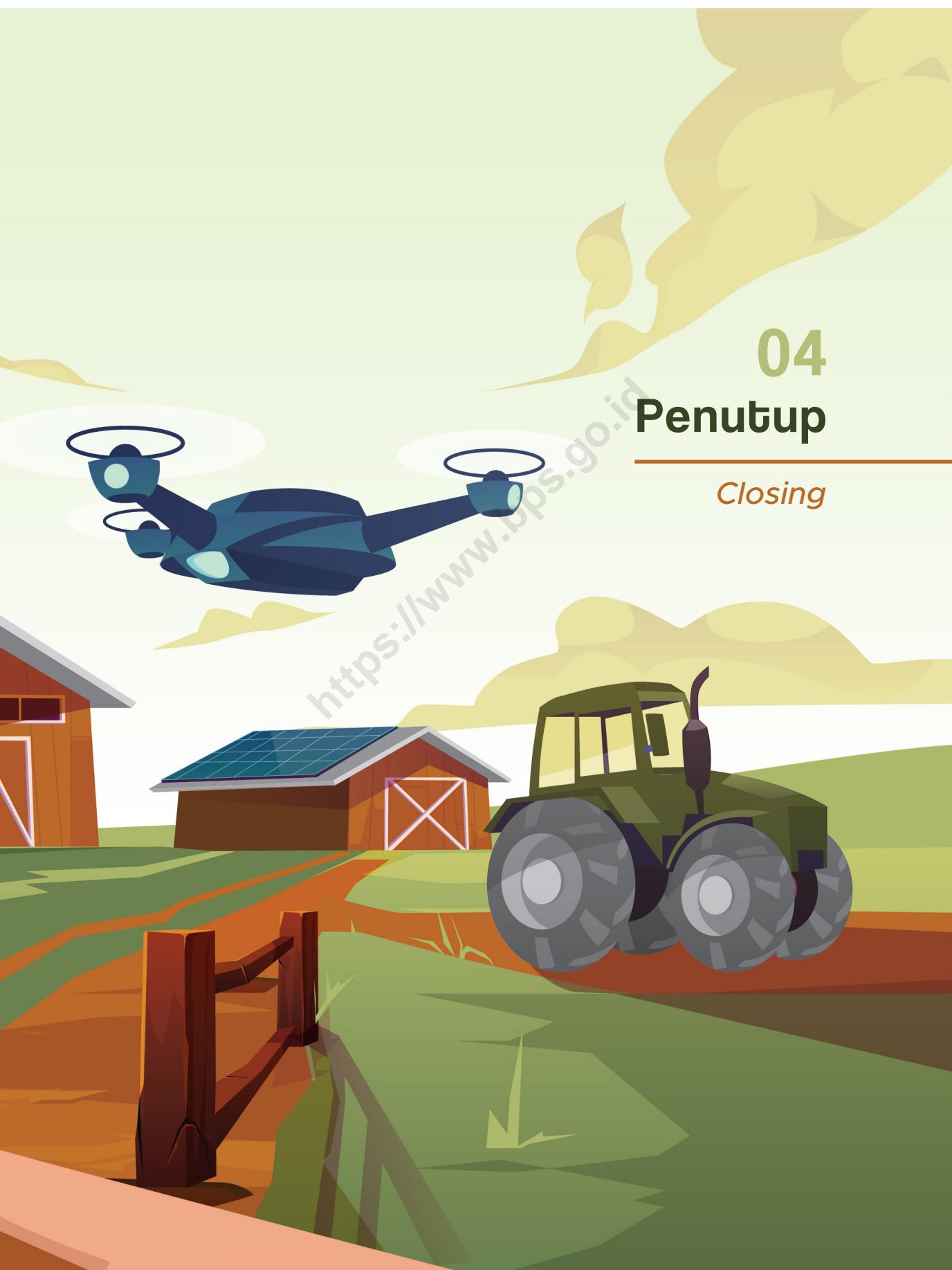




## 04 **Penutup**

---

*Closing*



## Penutup

### Closing

Tingkat kelaparan yang tinggi dan kekurangan gizi yang terus-menerus terjadi serta aktivitas manusia yang tidak menerapkan praktik berkelanjutan menghadirkan tantangan besar bagi pertanian. Untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat, pertanian perlu memproduksi lebih banyak pangan secara global pada periode yang sama. Pertanian yang berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, komunitas dan ekosistem, dan pada gilirannya, memberantas kemiskinan dan kelaparan.

Untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan sektor pertanian berdasarkan statistik yang sesuai, informasi dan peta geospasial, serta pengetahuan kualitatif. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sektor pertanian ini merupakan statistik yang dapat memotret sejauh mana rangkaian rencana aksi global diterapkan pada sektor pertanian.

*The persistent high levels of hunger and malnutrition and unsustainable human activities present a major challenge to agriculture. To meet the growing demand for food, farm needs to produce more food globally in the same period. Sustainable agriculture can increase the resilience of people, communities and ecosystems, and in turn, eradicate poverty and hunger.*

*Achieving sustainable agriculture requires planning and management of the agricultural sector based on appropriate statistics, geospatial information and maps, and qualitative knowledge. This indicator of the Sustainable Development Goals (SDGs) for the agricultural sector is a statistic that can portray the extent to which a series of global action plans are applied to the agricultural sector.*



Ketersediaan empat indikator TPB sektor pertanian baru dapat menggambarkan keadaan pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dari hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2020. Hal ini merupakan upaya BPS dalam rangka memperkaya capaian indikator TPB Indonesia berstandar global secara bertahap. Pengembangan dan penyempurnaan penghitungan indikator TPB sektor pertanian yang sama di tingkat nasional dan regional diharapkan dapat dilakukan pada tahun berikutnya melalui hasil SITASI 2021.

*The four SDGs indicators for the agricultural sector can only present the conditions in the Provinces of West Java, East Java and West Nusa Tenggara from the results of the Integrated Agricultural Survey (SITASI) in 2020. The efforts carried out by BPS are gradually enriching the achievement of the SDGs indicators for Indonesia with global standards. It is hoped that the development and improvement of the calculation of the SDGs indicator for the agricultural sector at national and regional levels can be carried out in the following year through the results of SITASI 2021.*

Disadari bahwa untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun regional. Namun demikian, keberlanjutan harus dilihat sebagai proses, bukan sebagai titik akhir yang didefinisikan secara tunggal untuk dicapai. Pada akhirnya, pencapaian tujuan-tujuan pada pertanian berkelanjutan ini akan berdampak positif dalam menunjang tercapainya indikator TPB lainnya.

*It is realized that to achieve sustainable agriculture requires collaboration from all stakeholders, both national and regional. Nevertheless, sustainability should be considered as a process, not a single defined end point to achieve. In the end, the achievement of these goals on sustainable agriculture will have a positive impact in supporting the achievement of other SDGs indicators.*





## Daftar Pustaka

### References

- Badan Pusat Statistik. 2020. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2020. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Jakarta: BPS
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017. "Defining Small Scale Food Producers to Monitor Target 2.3 of The 2030 Agenda for Sustainable Development," FAO Statistics Working Paper Series/ 17-12.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. "Methodology for Computing and Monitoring the Sustainable Development Goal Indicators 2.3.1 and 2.3.2," FAO Statistics Working Paper Series/ 18-14.
- FAO; The World Bank; UN-Habitat. 2019. Measuring Individuals' Rights to Land: An Integrated Approach to Data Collection for SDG Indicators 1.4.2 and 5.a.1. Washington, DC: World Bank. © FAO, The World Bank, and UN-Habitat. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- UN Women. Module 3 : Calculating Gender Statistics for SDGs Monitoring. Accessed by 29 December 2020 from [https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Asia-Pacific-Training-Curriculum/Module3/Module3\\_Training%20syllabus\\_Final.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Asia-Pacific-Training-Curriculum/Module3/Module3_Training%20syllabus_Final.pdf)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta: Bappenas

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

---

*Enlighten The Nation*



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
*BPS-Statistics Indonesia*

Jl. dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710  
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291 - 4, Fax: (021) 3857046  
Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)